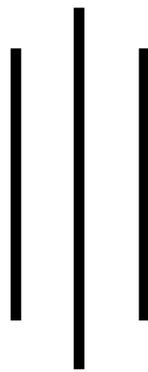




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN 2022



Jalan Jenderal Sudirman By Pass Rantau
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan



IKHTISAR EKSEKUTIF



LKjIP tahun 2022 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.



Kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat baik. Pencapaian IKU pada sasaran strategis meningkatnya investor dengan indikator kinerja nilai investasi dimana pencapaiannya mencapai 1.012,15 Milyar Rupiah, namun untuk indikator persentase pertumbuhan PMA/PMD mengalami peningkatan yaitu dengan realisasi 11,91%. Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan tingkat kepuasan pelayanan perizinan dengan pencapaian sebesar 86,68. Indikator tambahan pada DPMPTSP setelah asistensi dengan evaluator Kemenpan yaitu Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu dengan realisasi 100%. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani dengan realisasi 100%. Persentase Pelaku Usaha yang berizin dengan realisasi 100%. Persentase investasi yang lolos izin lingkungan dengan realisasi 100%. Persentase izin yang update dengan realisasi 100%. Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi dengan realisasi 0,00%.

Hasil evaluasi capaian setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPMPTSP Kabupaten Tapin ke depan yaitu ; Pertama, Sasaran pertama IKU DPMPTSP Kabupaten Tapin yaitu meningkatnya investor telah dan persentase pertumbuhan investasi telah mencapai target yang sangat baik, hal ini



disebabkan mulai membaiknya iklim investasi di Kabupaten Tapin serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kegiatan investasinya melalui LKPM.



Diharapkan DPMPTSP dapat terus meningkatnya kinerja melalui berbagai upaya seperti Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Tapin serta fokus pada sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tapin. Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Tapin sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Tapin lebih meningkat. Ketiga, Sinkronisasi peraturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan baik mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan mapumun terkait Penanaman Modal terhadap para stakeholder, sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah. Keempat, masih lemahnya koordinasi DPMPTSP dengan Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Tapin. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam perumusannya, dan kita mengharapkan, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LKjIP tahun 2022 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam perumusannya, Dan kita mengharapkan, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raport 10 Februari 2023
Kepala DPMPPTSP,

Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF		
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 GAMBARAN UMUM SKPD.....	1
	1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
	1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
	1.4 SUMBER DAYA (SARANA DAN PRASARANA)	6
	1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	10
	1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2021	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
	2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	17
	2.3 FAKTOR INTRERNAL	19
	2.4 FAKTOR EKSTERNAL.....	20
	2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
	2.6 PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
	3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
	3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	37
	3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	44
	3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional....	45
	3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	46
	3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
3.2 Realisasi Anggaran.....	66
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	70
4.2 EVALUASI.....	71
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.2 Susunan Kepegawaian	7
Tabel 1.3 Jumlah Jabatan	8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Tapin	8
Tabel 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin	10
Tabel 1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021.....	13
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis	18
Tabel 2.2 Faktor Internal	19
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 2.4 Penjelasan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja.....	23
Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tapin Tahun 2022	28
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi IKU dengan Target	30
Tabel 3.3 Tabel 3.3 Rekap LKPM Tahun 2022	31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.....	37
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 dan 2019.....	40
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah .	46
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	47
Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi	48
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan	52
Tabel 3.10 Rata-rata Nilai Masing-masing Unsur SKM.....	62

Tabel 3.11 Realisasi Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	66
---	----

DAFTAR FOTO

Foto 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	30
Foto 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	31
Foto 3.5 Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kemudahan Berusaha	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin . Dinas ini sebagai perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Untuk memperbaiki birokrasi perizinan, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Inpres ini memberikan instruksi kepada Kementrian dan Lembaga untuk segera melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan sehingga iklim investasi lebih bergairah. Salah satu Inpres tersebut memuat tentang Percepatan Perizinan kegiatan usaha dan Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia.

Untuk melaksanakan Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam rangka pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tapin menerbitkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu. Tim Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan cikal bakal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Tapin dan bersifat sementara sampai dibentuknya suatu lembaga perizinan terpadu yang definitif. Kewenangan perizinan yang ditangani oleh Tim Pelayanan Perizinan Terpadu, diatur melalui Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin, yaitu :

1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)



2. Ijin Reklame
3. Ijin Gangguan (HO)
4. Ijin KP Penyelidikan Umum
5. Ijin KP Ekspolasi (Sebagai Peningkatan KP Penyelidikan Umum)
6. Perpanjangan KP Ekspolarasi
7. Ijin KP Ekspolaitasi (Peningkatan KP Eksplorasi)
8. Perpanjangan Ijin KP Ekspoitasi
9. Izin Angkutan Pedesaan
10. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan

Pembentukan Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin didasari oleh amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang salah satu Diktumnya mengatur Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Secara ringkas, dasar hukum pembentukan Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. INPRES No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peraturan Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin,
12. Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

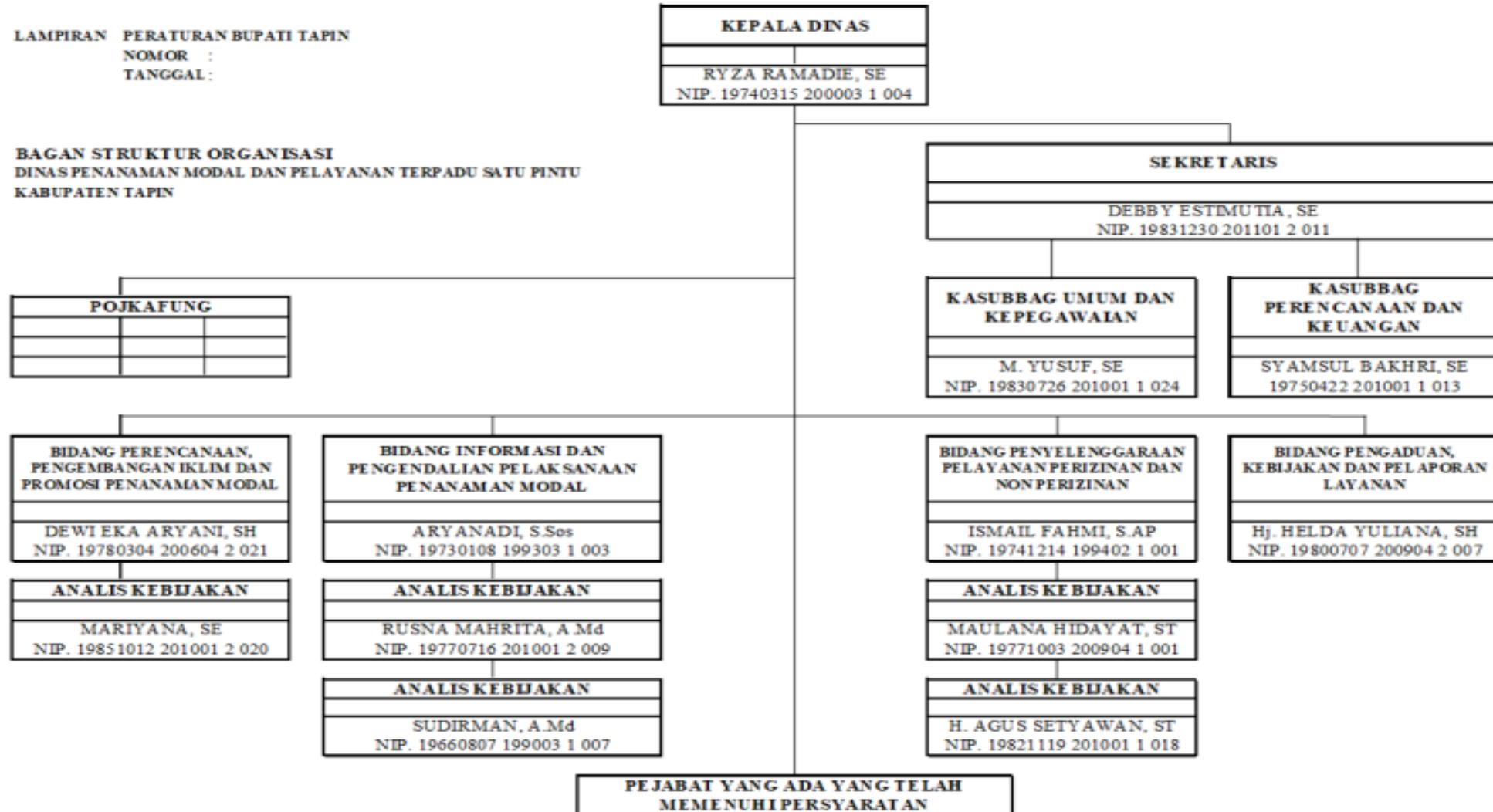
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sesuai Perbub No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :
TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPIN





1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perIzinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Uraian Tugas dimaksud diatas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perIzinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran kantor
- c. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan perIzinan bidang perekonomian.
- d. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan perIzinan bidang kesejahteraan rakyat
- e. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan perIzinan bidang pembangunan.
- f. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan perIzinan bidang pemerintahan dan lain-lain.
- g. Melaksanakan pelayanan administrative dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

1.3.2 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk teknis pelayanan penanaman modal, pelayanart perizinan dan pelayanan non perizinan.
- d. Penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non peizinan.



- e. Pengkajian, pengembangan dan promosi potensi penanaman modal.
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

1.4 SUMBER DAYA (SARANA DAN PRASARANA)

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sesuai Perbub No. 38 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas : Eselon II a
- Sekretaris : Eselon III a
- Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal : Eselon III b
- Kabid Data Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Eselon III b
- Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : Eselon III b
- Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan : Eselon III b
- Kasubbag Perencanaan & Keuangan : Eselon IV a
- Kasubbag Umum & Kepegawaian : Eselon IV a
- JF. Analis Kebijakan
- Pranata Komputer
- Pelaksana

Dilihat dari latar belakang pendidikan, SDM yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tergambar dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS (orang)
1	Strata 2 (Pasca Sarjana)	0
2	Strata 1 (Sarjana)	13
3	Diploma	3
Jumlah		16



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2022 dalam operasionalnya terdiri dari 16 orang pegawai, adapun susunan Pangkat dan Golongan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Tabel 1.2 Susunan Kepegawaian

N0	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN
1	RYZA RAMADIE, SE NIP. 19740315 200003 1 004	Pembina Utama (IV/c)	KEPALA DINAS
2	DEBBY ESTIMUTIA, SE NIP. 19831230 201101 2 011	Penata TK.I (III/d)	SEKRETARIS
3	ARYANADI, S.Sos NIP. 19730108 199303 1 003	Pembina Utama (IV/a)	KABID. INFORMASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
4	DEWI EKA ARYANI, SH NIP. 19780304 200604 2 021	Pembina Utama (IV/a)	KABID. PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
5	ISMAIL FAHMI, S.AP NIP. 19741214 199402 1 001	Penata TK.I (III/d)	KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
6	Hj. HELDA YULIANA, SH NIP. 19800707 200904 2 007	Penata TK.I (III/d)	KABID. PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
7	MAULANA HIDAYAT, ST NIP. 19771003 200904 1 001	Penata TK.I (III/d)	ANALIS KEBIJAKAN
8	H. AGUS SETYAWAN, ST NIP. 19821119 201001 1 018	Penata TK.I (III/d)	ANALIS KEBIJAKAN
9	SUDIRMAN, A.Md NIP. 19660807 199003 1 007	Penata TK.I (III/d)	ANALIS KEBIJAKAN
10	SYAMSUL BAKHRI, SE NIP. 19750422 201001 1 013	Penata TK.I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
11	MARIYANA, SE NIP. 19851012 201001 2 020	Penata TK.I (III/d)	ANALIS KEBIJAKAN
12	M. YUSUF, SE NIP. 19830726 201001 1 024	Penata TK.I (III/d)	KASUBBAG



			UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13	RUSNA MAHRITA, A.Md NIP. 19770716 201001 2 009	Penata (III/c)	ANALIS KEBIJAKAN
14	IWAN SETIAWAN, A.Md NIP. 19760103 201001 1 012	Penata Muda TK.I (III/b)	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN
15	DINA JULIANI, SE NIP. 19920716 201903 2 010	Penata Muda (III/a)	PELAKSANA (PENATA KEUANGAN)
16	FATHUR RAHMAN R, A.Md NIP. 19850707 200701 1 005	Pengatur TK.I (II/d)	PELAKSANA (BENDAHARA)

Untuk mendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Tahun 2022 SKPD memiliki pegawai sebanyak **16 orang** yang terdiri dari orang memegang jabatan struktural 8 dan 6 orang fungsional dan 2 orang jabatan non struktural, seperti tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural (orang)	8
2	Jabatan Fungsional (orang)	6
3	Jabatan Non Struktural (orang)	2
JUMLAH		16

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, DPMPTSP Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. DPMPTSP Kabupaten Tapin memiliki daftar aset yang dimiliki dan digunakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Tapin

NO.	JENIS ASET	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1
2	Kendaraan Roda Dua	4
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1
4	Mesin Calculator	3
5	Filling Besi/Metal	3
6	Band Kas	1



7	White Board	2
8	Rak Kayu	1
9	Kursi Putar	3
10	Meja Komputer	2
11	P.C Unit	10
12	Printer	16
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
16	Meja Kerja Pegawai Lain-lain	7
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15
21	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6
22	Meja Rapat	1
23	Meja Reseption	2
24	Kursi Rapat	16
25	Kipas Angin	4
26	Kursi Tamu	5
27	Sofa	1
28	AC Split	7
29	Loudspeaker	1
30	Modem	1
31	Kursi Lipat	1
32	Personal Komputer	1
33	Rak TV	1
34	Lemari Es	3
35	Camera Film	10
36	Handy Cam	2
37	Dispenser	1
38	Lap Top	9
39	Note book	9
40	Peralatan Jaringan Lain-lain / Jaringan Aplikasi Simda	1
41	Audio Amplifier	1
42	Facsmile	2
43	Pesawat Telephone	1
44	Papan Visual	1
45	Internet	1
46	Server	1
47	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	9
48	Kursi Tamu Pelayanan	4
49	Meja Komputer	2
50	Kipas Angin	2
51	TV	4
52	Tangga Aluminium	1
53	LCD Proyektor	2
54	Unintemuptible Power Supply (UPS)	11
55	Genset	1



56	Scanner	1
57	Kompas	1
58	Jam dinding	2
59	GPS	1
60	Alat Kantor Lainnya	1
61	Meubel Lainnya	1
62	Mesin Penghisap Debu	1
63	Sound System	2
64	Tangga Aluminium	1
65	Alat Rumah Tangga Lainnya	12
66	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1
67	Monitor	2
68	Router	1
69	Audio Amplifier	1
70	Handy Talky	7
71	SSB Portable	2
72	Sepatu	1
73	Personal Komputer	1

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan Pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - UMKMK menemui beberapa kendala di perijinan seperti sertifikasi jaminan produk halal, SNI, hak paten. - Terbatasnya wadah untuk mempromosikan produk UMKMK. - Tidak adanya laporan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin maupun ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin selaku Tim CSR Kabupaten. - Potensi investasi daerah belum maksimal dipromosikan. - Media promosi investasi yang terbatas
Isu Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih memfokuskan ke arah Seminar Bisnis/ Forum Temu Bisnis yang merupakan Matchmaking antara UMKMK dengan Usaha



	<p>Menengah Besar. Kegiatan ini dapat melibatkan KADIN maupun HIPMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan UMKMK dalam event-event seperti Hari Anti Korupsi, kegiatan rutin OJK, dan lain-lain. - Dukungan legal Peraturan Daerah mengenai Insentif Penanaman Modal. - Sehubungan dengan upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan dan proyek investasi harus dalam kategori <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO). Latar Belakang penyusunan IPRO antara lain proyek-proyek yang telah memenuhi kriteria <i>ready to offer</i> berdasarkan penyusunan dokumen studi perlu disusun muatan versi singkat dan ringkas untuk mempermudah investor dan BKPM mendukung proyek potensial yang membutuhkan dukungan swasta (investor) dengan menyusun IPRO. - Kegiatan promosi saat ini lebih mengarah kepada Seminar Bisnis/ <i>One on One Meeting</i>/ Forum Bisnis, <i>Market Sounding</i>, <i>Market Consultation</i>, <i>On on One Project Consultation</i>.
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan survei masih manual - Sistem, mekanisme dan prosedur masih manual - Sarana dan prasarana pada kantor DPMPTSP masih belum memenuhi standar
Isu Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan survei berbasis online secara langsung dapat mencerminkan tingkat kualitas - Memberikan layanan informasi dan pengaduan dalam rangka menjalankan gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik. - Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha dimana Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, akseibilitas dan kenyamanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang



	menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / Swasta
BIDANG INFORMASI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none">- Sistem OSS yang masih dalam Pengembangan, sehingga Pelaku Usaha banyak mengalami kendala dalam penginputan Laporan LKPMnya- Pengeluaran selama tahap konstruksi diluar tanah,bangunan/gedung, dan mesin/peralatan diinput sebagai tambahan realisasi modal kerja- Mengisi nilai tambahan realisasi penanaman modal sama persis untuk setiap KBLI (apabila memiliki lebih dari satu)- Adanya Pelaku Usaha yang hanya melaporkan LKPM pada sistem OSS di Pusat,namun tidak melaporkan kewajiban LKPM nya di tingkat Kabupaten sehingga kompilasi realisasi investasi di Kabupaten tidak dilaporkan- Laporan LKPM oleh Pelaku Usaha yg sudah pada tahap Produksi tidak melaporkan Produksi barang/jasanya begitu juga dengan jumlah penggunaan tenaga kerjanya
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Pelaku Usaha/Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Usaha Penanaman Modal Pada Sistem OSS Masih Rendah- Koordinasi DPMPTSP dengan Dinas Teknis belum optimal- Belum optimalnya tim teknis dalam pengelolaan pelayanan perizinan- Perubahan IMB menjadi PBG (UU No. 11 Tahun 2020 dan PP 16 Tahun 2021)- Perubahan sistem perizinan IMB menjadi PBG (manual menjadi online / SIMBG) <p>Persyaratan teknis bangunan</p>
Isu Strategis	<ul style="list-style-type: none">- Kemudahan pelayanan perizinan pembangunan bangunan gedung (secara digital)- Legalitas bangunan gedung- Standar teknis bangunan gedung



1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor:700/Reg/090/AKIP/Wil.III/VIII/NSP/2022, DPMPTSP memperoleh nilai 66,15 dengan kategori B. Adapun saran/rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam rangka peningkatan Akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

NO	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisa penetapan target	- Telah dibuat analisa penetapan target kinerja
2.	Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	- Telah dilaksanakan rapat penetapan Perjanjian Kinerja
3.	Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan	- SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja telah ditetapkan
4.	Keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja	- Pemantauan capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulan oleh pimpinan
5	Menyempurnakan pengukuran capaian kinerja dengan membuat analisis relevansi dan kecukupan data kinerja	- Telah dibuat analisis relevansi dan kecukupan data kinerja
6.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja	- Pengukuran capaian kinerja menggunakan E-Sakip V2
7.	Melaksanakan review internal terhadap dokumen laporan kinerja	- Telah dilaksanakan review internal terhadap dokumen kinerja
8.	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian utama Pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaporan kinerja memberikan dampak besar dalam strategi /kebijakan untuk mencapai kinerja.	- Informasi dalam dokumen LkjIP telah memberikan dampak terhadap budaya organisasi melalui pemantauan capaian kinerja menggunakan e-Sakip - Dan telah dilaksanakan monev kinerja setiap triwulan melalui rapat.
9.	Informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk budaya kinerja organisasi	- Laporan kinerja digunakan sebagai acuan untuk memberikan reward atas capaian kinerja
10.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja	- Evaluasi telah dilaksanakan dari proses Perjanjian Kinerja hingga capaian kinerja
11.	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa SOP evaluasi kinerja internal	- Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja, SOP pengukuran kinerja dan SOP penyusunan LKjIP
12.	Meningkatkan kompetensi evaluator internal berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja	- Mengikuti sosialisasi terkait SAKIP
13.	Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja	- Menggunakan e-SAKIP v2
14.	Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi implementasi SAKIP	- Bukti tindak lanjut evaluasi SAKIP telah didokumentasikan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMPTSP untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkankan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya daya tarik investasi
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Investor
- b. Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan

VISI dan MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan



kesederhanaan kalimat, diupayakan visi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini.

Visi Kepala Daerah

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Berdasarkan visi diatas dapat diproses dirumuskan sebagai misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Secara garis besar Visi dan Misi DKPD sama dengan Visi dan Misi Kabupaten, namun tidak semua Visi dan Misi tersebut yang menjadi Visi dan Misi SKPD.

Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada ***MISI KE 4 (EMPAT)*** dan ***KE 5 (LIMA)***

Misi ke 4 (empat) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.



Iklm investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Pelayanan dengan **MISI Ke 4 (Empat)** kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin berusaha melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan peluang investasi daerah dan penguatan produk lokal
2. Menggali potensi-potensi investasi
3. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
4. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
5. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi

Iklm investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi ke 5 (lima) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk mewujudkan Pelayanan Pelayanan dengan **MISI Ke 5 (Lima)** kepada masyarakat, dengan Prinsip Good and Clean Governance kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin berusaha melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dengan mengikutkan Pegawai DPMPTSP melalui pelatihan/Bimtek.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dengan cara bekerjasama dengan Pihak Ke- tiga untuk melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan dengan



juga dengan cara meningkatkan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD terkait .

3. Meningkatkan System Informasi Pelayanan Perijinan dengan cara membangun system informasi pelayanan perijinan yang terintegrasi melalui jaringan internet atau media lain sehingga bisa diakses oleh publik.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan dengan cara menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan representatif serta mewujudkan wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan.

Dari ke 4 (empat) hal tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana Pembangunan Mall Pelayanan Publik
Mendorong peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban melaporkan kegiatan penanaman modal dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha yang memiliki izin dan menyampaikan LKPM	Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha
Mendorong Koordinasi dengan stake holder dan pihak terkait	Peningkatan identifikasi peluang dan potensi unggulan penanaman modal
	Peningkatan jumlah informasi/promosi investasi



Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis

VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH : “ BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU. SEJAHTERA DAN AGAMIS”													
MISI KE 4 : “Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.													
KABUPATEN			DPMPTSP										
NO	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	Indikator	SASARAN	INDIKATOR	2017	2018	2019	2021	2021	2022	2023
1	Meningkatnya keamanan daerah	Indek rasa aman	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi	318,4	75.37,00	150	170	510	525	541
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi (%)				Persentase Peningkatan Pertumbuhan PMA/PMDN	57,7	-76,32	5	5	3	3	3
Misi ke 5 : “Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.													
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang profesional dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	80,58	80,65	81	81,5	84,5	85	85,5
						Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	100%
						Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	-	-	-	-	100%	100%	100%
						Persentase pelaku usaha yang berizin	-	-	-	-	100%	100%	100%
						Persentase izin yang update	-	-	-	-	100%	100%	100%
						Persentase rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	-	-	-	-	-	100%	100%
						Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	-	-	-	-	100%	100%	100%



2.3 Faktor Internal

Tabel 2.2 Faktor Internal

Aspek kajian	Capaian kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi
Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan perizinan telah menggunakan sistem yaitu OSS.- Pelayanan peizinan secara online belum seluruhnya.- Pelayanan perizinan IMB telah menggunakan SIMBG	<ul style="list-style-type: none">- Untuk periznan yang berbasis OSS telah dilaksanakan, namun yang tidak masuk dalam OSS masih offline.
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Mekanisme Pengaduan telah ada dan ditetapkan. Pemanfaatan media pengaduan masih mini	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optimal- Kurangnya PNS yang menangani pengaduan
Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Pesnyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perijinan masih belum berjalan dengan baik.- Data base dan aplikasi perizinan.- Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya sistem untuk menyimpan data dan informasi
Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman telah belum memenuhi target namun harus ditingkatkan lagi	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Juknis dari BKPM untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran- Dana DAK Non Fisik penunjang pelaksanaan kegiatan
Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi	<ul style="list-style-type: none">- Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan terkait Penanaman Modal masih belum lengkap- Saprass pendukung masih terbatas- Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah
Sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none">- Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP	<ul style="list-style-type: none">- Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan



2.4 Faktor Eksternal

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat tercapainya kinerja :

- Peraturan terkait penanaman modal dan perizinan yang sering berubah-ubah sehingga menjadi kendala teknis dilapangan.
- Adanya upgrade OSS 1.1 ke OSS RBA mengakibatkan pelaku usaha yang belum memahami kesulitan untuk migrasi ke OSS RBA.
- Penggunaan OSS yang belum dipahami keseluruhan masyarakat.

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP ke depan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP KAB. TAPIN 2022 :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (milyar Rp)
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan
		Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani
		Persentase Pelaku Usaha yang berizin
		Persentase izin yang update
		Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi
		Persentase investasi yang lolos izin lingkungan

Tabel 2.4 Penjelasan Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Form Perhitungan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	525	LKPM	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n - \text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n_{-1}}{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n_{-1}} \times 100\%$	3%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$	100%	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	100%	Rekap Pengaduan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan (Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	85	Hasil survey Kepuasan masyarakat	Bidang Pengaduan. Kebijakan dan pelaporan Layanan



	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	$\frac{\text{Jumlah izin yang terbit}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin}} \times 100\%$	100%	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase izin yang update	$\frac{\text{Jumlah Izin yang Terbit Melalui OSS}}{\text{Jumlah Izin yang masuk di sistem OSS}} \times 100\%$	100%	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	$\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$	100%	LKPM. Dinas Tenaga Kerja	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	$\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin Lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin Lingkungan}} \times 100\%$	100%	Rekap Izin yang diterbitkan dan Data Pelaku Usaha	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan/ Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



2.6 PERJANJIAN KINERJA

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Kepala Dinas	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (PMDN/PMA) (milyar Rp)	Rp 525 Milyar	1.012,15
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi	3%	11,91%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	86,68
		Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%
		Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%
		Persentase izin yang update	100%	100%
		Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100%	0,0000098%
Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%		
Sekretaris	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Predikat nilai evaluasi SAKIP	BB	B
	Pelayanan sarana dan prasarana dan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%



	administrasi perkantoran			
	Peningkatan kualitas SDM SKPD	Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian	100%	25%
	Meningkatnya Pelayanan administrasi keuangan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD Persentase penyerapan anggaran SKPD Persentase aset yang tercatat	100% 100% 100%	100% 83,16 100%
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya tertib administrasi data kepegawaian	Persentase Pegawai ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Memadai	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	82%
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan	90%	25%
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%
	Menyusun perencanaan dan laporan kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	100%
		Nilai hasil evaluasi SAKIP	BB	B
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100%	100%
		Persentase Peluang Penanaman Modal yang di promosikan	100%	100%
		Persentase Fasilitas Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	100%	100%
Kasi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Promosi Peluang Penanaman Modal	Jumlah Peluang Penanaman Modal yang dipromosikan	2	2
		Jumlah Fasilitas Kemitraan UMKM	1	1



Kasi Perencanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Jumlah koordinasi Perencanaan. Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Peluang Penanaman Modal Daerah yang Teridentifikasi	2 2	1 1
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	600	1.788
Kasi Perizinan dan Non Perizinan I	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah pemenuhan pelayanan (dok. permohonan) perizinan dan non perizinan I (Sektor Perdagangan. Perindustrian. Pariwisata. Perhubungan. Komunikasi dan Informatika. Ketenagakerjaan) yang dapat diproses	250	1.017
Kasi Perizinan dan Non Perizinan II	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah pemenuhan pelayanan (dok. permohonan) perizinan dan non perizinan II (Sektor Pendidikan. Lingkungan Hidup. Pertanian. Kesehatan. Pekerjaan Umum dan Perumahan. Perikanan) yang dapat diproses	350	771
Kepala Bidang Pengaduan. Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan. Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase Jumlah Pengaduan yang terselesaikan Updating Regulasi Penanaman Modal	100% 100%	100% 100%
Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Layanan Penanaman Modal	1	1
Kasi Pengaduan. Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	10	1
Kepala Bidang Informasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya ketaatan Pelaku Usaha	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100% 100%	96% 100%
Kasi Pemantauan. Pengawasan dan Pembinaan	Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	100%	96%



Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina	100%	38%
Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen
Bendahara Pengeluaran	Tersedianya kuitansi SPJ belanja kegiatan	Jumlah kuitansi SPJ belanja kegiatan	400	999
	Tersedianya SPP Ganti Uang	Jumlah SPP Ganti Uang	12	12
	Tersedianya SPP LS (Langsung)	Jumlah SPP LS (Langsung)	26	79
	Tersedianya SPP Uang Persediaan	Jumlah SPP Uang Persediaan	1	1
	Tersedianya SPP Tambah Uang	Jumlah SPP Tambah Uang	2	7
	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	Jumlah SPP Ganti Uang Nihil	1	1
	Tersedianya Tambah Uang Nihil	Jumlah Tambah Uang Nihil	2	7
	Terlaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	Jumlah input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400	999
	Terlaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	Jumlah Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150	228
	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	Jumlah laporan pertanggung jawaban bulanan	12	12
	Tersedianya laporan penutupan kas	Jumlah laporan penutupan kas	2	3
	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	Jumlah bahan pembuatan Laporan Keuangan	2	2
Penata Keuangan	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	Persentase data laporan kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	100%
	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	Persentase data laporan keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	100%



	Terlaksananya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	Terlaksananya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan Persentase administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%
Pranata Komputer	Melakukan Penggandaan data dan program (0.013/25Kb)	Jumlah penggandaan data & program(0.013/25Kb)	100	100
	Membuat laporan operasi komputer (0.013/laporan)	Jumlah laporan operasi komputer(0.013/laporan)	100	100
	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0.048/dokumen)	Jumlah dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer(0.048/dokumen)	100	100
	Melakukan perekaman data dengan validasi (0.001/1000 karakter)	Jumlah Perekaman data dengan validasi (0.001/1000 karakter)	100	100
	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0.004/1000 karakter)	Jumlah perekaman data tanpa validasi (0.004/1000 karakter)	100	100
	Perekaman data (0.013/25 KB)	Jumlah Perekaman data (0.013/25 KB)	100	100
	Perbaikan dan pendeteksian (0.006)	Jumlah Perbaikan dan Pendektesian (0.006)	150	150



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dibawah ini merupakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Investor *	Nilai Investasi (Milyar Rp)	525	1012,15
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%) $\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n - \text{Investasi PMA/PMDN Thn } n - 1}{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n - 1} \times 100\%$	3%	11,91%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan **	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	86,68
		Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan (Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik)		
		Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$		
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	100%	100%



	Persentase Pelaku Usaha yang berizin $\frac{\text{Jumlah izin yang terbit}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin}} \times 100\%$	100%	100%
	Persentase izin yang update $\frac{\text{Jumlah Izin yang Terbit Melalui OSS}}{\text{Jumlah Izin yang masuk di sistem OSS}} \times 100\%$	100%	100%
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi $\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$	100%	0,0000098%
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan $\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin Lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin Lingkungan}} \times 100\%$	100%	100%

Sumber data :

* Nilai Investasi : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

** Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2022



1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Investor”

Sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin yang pertama yaitu “Meningkatnya Investor“ dengan indikator kinerja yaitu (1) Nilai Investasi (Milyar Rp.) dan (2) Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%). Terkait dengan sasaran diatas. pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi IKU dengan Target

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Investor*	Nilai Investasi (Milyar Rp)	525	1012,15	192,79%
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	3	11,91	396,98%

Sumber Data :

*: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator pertama “Nilai Investasi” realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.012,15 milyar dengan target yang telah



ditetapkan yaitu sebesar Rp 525 milyar. Capaian kinerja sebesar 192,79%. Nilai realisasi investasi tersebut terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 927,52 Milyar dan PMA sebesar Rp 84,63 Milyar.

Indikator kedua yaitu Persentase pertumbuhan PMA/PMD realisasi persentase pertumbuhan investasi tahun 2022 yaitu 11,91% dengan target 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target Nilai Investasi dan Persentase Pertumbuhan Investasi beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPMPTSP yaitu meningkatkan iklim investasi. Dengan tersedianya Peta Potensi Investasi berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapa sektor yang menjadi prioritas untuk dipromosikan. Selanjutnya melakukan promosi/pameran potensi investasi yang telah diidentifikasi.

Selain pengembangan iklim investasi, langkah yang dilakukan oleh DPMPTS Kabupaten Tapin agar target realisasi investasi tercapai yaitu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulannya, sehingga dapat diketahui berapa nilai investasi yang masuk baik dari PMA maupun PMDN. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha/ perusahaan agar menyampaikan LKPM dengan melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian LKPM, selain itu bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam sistem OSS juga disediakan layanan berbantuan.



(Foto 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal)



(Foto 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal)

Tabel 3.3 Rekap LKPM Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	PERIODE	TAMBAHAN REALISASI PERIODE I - IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
1	PT KHARISMA INTI USAHA (0126)	TW I	Rp. 18.668.946.255	
		TW II	Rp. 22.483.194.934	
		TW III		
		TW IV	Rp. 38.649.494.351	
2	PT. KHARISMA INTI USAHA (1043)	TW I	Rp. 2.390.888.990	
		TW II	Rp. 1.378.666.605	
		TW III		
		TW IV	Rp. 1.057.363.398	
3	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (0990)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 36.001.013.268
		TW IV		
4	PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (0510)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 29.725.363.506
		TW IV		



5	PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (4661)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 15.785.446.303
6	PT. TRI BUANA MAS (0136)	TW I		Rp. 1.938.284.127
		TW II		
		TW III		Rp. 20.916.052.775
		TW IV		Rp. 24.717.863.818
7	PT. BHUMI RANTAU ENERGI (4661)	TW I		Rp. 15.572.434.501
		TW II		Rp. 4.781.345.180
		TW III		Rp. 11.825.239.975
		TW IV		Rp. 14.043.451.686
8	PT. PLANTINDO AGRO SUBUR (0126)	TW I		Rp. 4.082.137.005
		TW II		Rp. 2.570.052.685
		TW III		Rp. 9.647.170.248
		TW IV		Rp. 11.126.117.388
9	PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (0510)	TW I		Rp. 26.027.113.895
		TW II		Rp. 47.444.360.724
		TW III		Rp. 8.350.369.864
		TW IV		Rp. 7.990.225.298
10	PT. KHARISMA ALAM PERSADA (1043)	TW I		Rp. 3.599.401.180
		TW II		
		TW III		Rp. 1.301.147.000
		TW IV		Rp. 174.919.500
11	PT. KHARISMA ALAM PERSADA (0126)	TW I		
		TW II		Rp. 6.498.968.506
		TW III		Rp. 7.443.638.878
		TW IV		Rp. 9.015.277.408
12	PT. BATU GUNUNG MULIA ENERGI (0990)	TW I		
		TW II		Rp. 100.217.562.503
		TW III		Rp. 3.871.808.000
		TW IV		Rp. 116.685.438.897



13	PT. BATU GUNUNG MULIA (4661)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 35.847.700
		TW IV		Rp. 31.149.000
14	PT. BATU GUNUNG MULIA (3520)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 41.967.201
		TW IV		
15	PT. HARAPAN BINUANG MUDA (7739)	TW I		
		TW II		Rp. 3.390.000.000
		TW III		
		TW IV		
16	PT. HARAPAN BINUANG MUDA (0990)	TW I		
		TW II		Rp. 2.900.000.000
		TW III		
		TW IV		
17	PT. HARAPAN BINUANG MUDA (7739)	TW I		
		TW II		Rp. 8.090.000.000
		TW III		
		TW IV		
18	PT. PRASMANINDO BOGA UTAMA (5629)	TW I		
		TW II		Rp. 290.759.468
		TW III		
		TW IV		
19	PT. TAPIN COAL TERMINAL (5222)	TW I		Rp. 1.265.832.845
		TW II		Rp. 1.271.730.153
		TW III		
		TW IV		Rp. 4.317.956.895
20	PT. BERKAT MURAH REZEKI (0510)	TW I		Rp. 164.174.545
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 361.575.498.374



21	CV. ABIYU (0990)	TW I		Rp. 25.000.000
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
22	PT. PERSADA SOKKA TAMA (5629)	TW I		
		TW II		Rp. 805.246.941
		TW III		
		TW IV		
23	PT. KOMET INFRA NUSANTARA (4221)	TW I		
		TW II		Rp. 400.000.000
		TW III		
		TW IV		
24	PT. CAKRAWALA PUTRA BERSAMA (7739)	TW I		
		TW II		Rp. 100.000.000
		TW III		Rp. 100.000.000
		TW IV		
25	CV. ZAM ZAM AIR MINERAL (0990)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp.994.100.000
26	CV. REZKY MULIA PELITA	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 200.000.000
27	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 166.666.666
	TOTAL TAMBAHAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2022		Rp. 84.628.554.533	Rp. 927.518.133.906
	TOTAL		Rp. 1.012.146.688.439	
Sumber : OSS Subsistem LKPM Tahun 2022				



2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”

Untuk mengukur indikator sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target indek kepuasan masyarakat DPMPTSP tahun 2022 yaitu sebesar 86,68 poin dengat target yang telah ditetapkan yaitu 85 poin dengan capaian realisasi sebesar 101,98%.

Indikator tambahan pada DPMPTSP setelah asistensi dengan evaluator Kemenpan yaitu Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu dengan realisasi 100%. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani dengan realisasi 100%. Persentase Pelaku Usaha yang berizin dengan realisasi 100%. Persentase investasi yang lolos izin lingkungan dengan realisasi 100%. Persentase izin yang update dengan realisasi 100%.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	86,68	101,98%
		Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%	100%
		Persentase izin yang update	100%	100%	100%
		Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100%	0,0000098%	0.00%
		Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%	100%

Sumber data :

** : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Tahun 2022



Dalam rangka melaksanakan tercapainya Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”, pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna layanan. Hasil survei ini menjadi masukan bagi DPMPTSP untuk memperbaiki layanan terhadap masyarakat dan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat DPMPTSP melaksanakan untuk peningkatan pelayanan perizinan yaitu dengan menyediakan petugas pelayanan, kurangnya ASN pada SDM pada DPMPTSP sehingga harus merekrut tenaga kontrak sebagai petugas pelayanan, dengan ini diharapkan pemberian layanan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam proses penerbitan izin terdapat Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi izin. Permasalah-permasalahan yang bersifat teknis juga dapat terjadi. Oleh karena itu dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam proses penerbitan izin. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan DPMPTSP dengan membangun Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Adapun progress dalam pembangunan MPP diakhir tahun 2022 yaitu sampai pada tahap renovasi lantai 1 gedung MPP, sebelumnya telah diselesaikan renovasi lantai 2 gedung MPP. Diharapkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan Soft Launching Mall Pelayanan Publik.



Tabel 3.4 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator IKU	Target Tahun 2022*	Kinerja Tahun 2022**		Program***	Kegiatan/ Sub Kegiatan***	Anggaran***
			Capaian	%			
1	2	3	4	5	8	9	10
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	525 Milyar	1012,15 Milyar	192,79%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 448.535.000,00
	Persentase Pertumbuhan PMA / PMDN	3 %	11,91%	396,98%		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 395.735.000,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 23.898.800.00
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. 23.898.800.00



					Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.994.000,00
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.994.000,00
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.600.000,00
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 21.600.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85 Poin	86,68 Poin	101,98%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 891.589.400,00



						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 286.385.000,00
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp. 305.385.000,00
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp 110.880.800,00
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp. 188.928.600,00
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%	100%			
	Persentase izin yang update	100%	100%	100%			
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100%	0,0000098%	0,00%			
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%	100%			

Sumber Data :

*: Renstra DPMTSP Tahun 2018-2023

** : LKPM Tahun 2022 dan SKM Tahun 2022

*** : DPA DPMTS Tahun 2022



3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

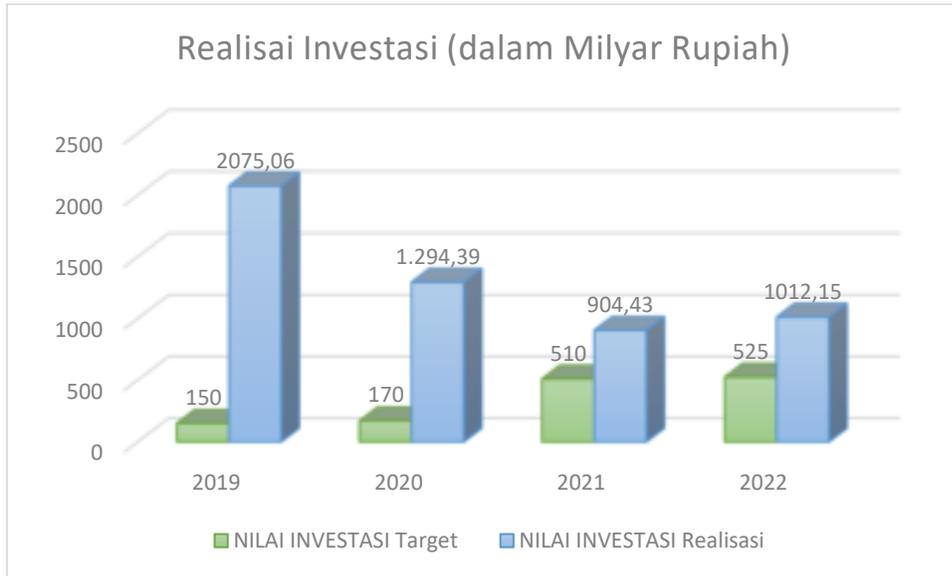
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021, dan 2020

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	INDIKATOR	Perbandingan Realisasi Kinerja								
		2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi	170	1.294,39	761,41%	510	519,388	101,83	525	1.012,15	192,79%
	Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	5%	-37,62%	-752,43%	3%	-30,13%	-752,43%	3%	11,91%	396,98%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	81,5	84,15	103,25	84,5	86,57	102,45%	85	86,68	101,98%
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase izin yang update	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	-	-	-	-	-	0,00	-	0,0000098%	0,00%
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data :
 *: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2020,2021 dan 2022
 **: Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Tahun 2020, 2021 dan 2022

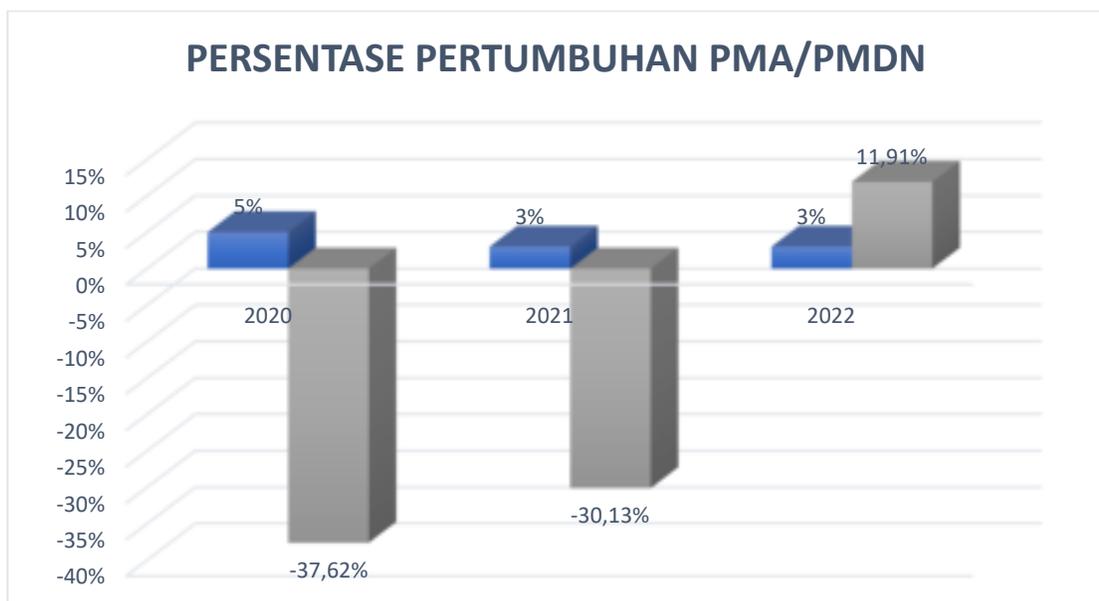


1. Nilai Investasi



	Target	Realisasi	Capaian
	(Milyar Rp)		
2020	170	1.294,39	761,41%
2021	510	904,43	177,34%
2022	525	1.012,15	192,79%

Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian indikator pertama “Nilai Investasi” tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada data diatas dapat dilihat bahwa Nilai Investasi menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp1.294,39 Milyar pada tahun 2020 dan Rp904,43 Milyar pada tahun 2022 sebesar Rp1.012,15. Perbandingan realisasi Nilai Investasi pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend yang meningkat dari tahun sebelumnya, dan target yang ditentukan telah tercapai.

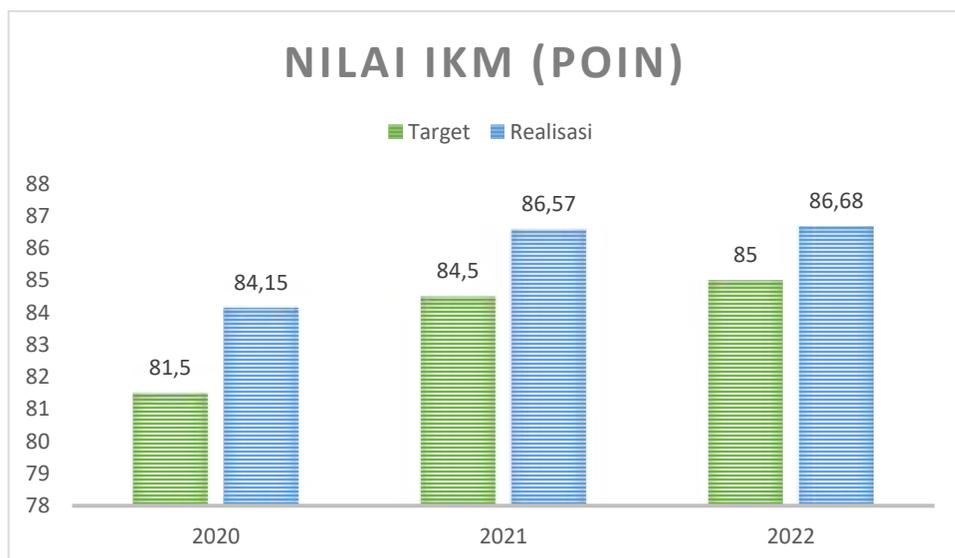




	Target	Realisasi	Capaian
2020	5%	-37,13%	-752,43%
2021	3%	-30,13%	-1.004%
2022	3%	11,91%	396,98%

Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian indikator kedua “Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN ” tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada data diatas dapat dilihat bahwa Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN dari tahun sebelumnya yaitu -37,62% pada tahun 2020 dan -30,13 pada tahun 2021 serta tahun 2022 11,91%. Perbandingan realisasi Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend yang meningkat hingga pada tahun 2022 tercapai pertumbuhan investasi yang positif.

2. Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan



	2020	2021	2022
Target	81,5	84,5	85
Realisasi	84,15	86,57	86,68
Capaian	103,25%	102,45%	101,98

Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada data diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 84,15 pada tahun 2020, tahun 86,57 tahun 2021 serta tahun 2022 sebesar 86,68 poin.



Perbandingan nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend yang terus meningkat. hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya capaian nilai SKM dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.

Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMPTS Kabupaten Tapin dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan tercapai dengan kategori Baik.

Deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbarui proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh Pemerintah untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat. Proses penyempurnaannya harus terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan yang tumpang tindih, mengurangi aturan prosedur, dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

3. Persentase Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terbit Tepat Waktu

Indikator		2021	2022
<i>Persentase Perizinan dan Nonperizinan Yang Terbit Tepat Waktu</i>	Target	100%	100%
	Realisasi	100%	100%
	Capaian	100%	100%

Tahun 2022 Persentase perizinan dan non perizinan tepat waktu tercapai 100% dari izin yang masuk sejumlah 1.788 izin dan jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sejumlah 1.788 izin sehingga realisasi kinerja yang dicapai yaitu 100%.



Perbandingan data dengan tahun 2021 kinerja yang dicapai sama yaitu realisasi 100%. Hasil capaian kinerja ini tidak lepas dari komitmen dan upaya dari DPMPTSP untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP dan SP yang telah ditetapkan.

4. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani

<i>Indikator</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani</i>	Target	100%	100%
	Realisasi	100%	100%
	Capaian	100%	100%

Tahun 2022 terdapat satu pengaduan yang masuk dan telah ditindaklanjuti. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 100%. Tahun 2021 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani tercapai 100%. Berdasarkan data dari rekap pengaduan yang masuk di DPMPTSP tahun selama tahun 2021 tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, oleh karena itu persentase pengaduan yang terselesaikan adalah 100%.

5. Persentase Pelaku Usaha Yang Berizin

<i>Indikator</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Persentase Pelaku Usaha Yang Berizin</i>	Target	100%	100%
	Realisasi	100%	100%
	Capaian	100%	100%

Tahun 2022 jumlah pengurusan izin yang masuk 1.778 dengan jumlah izin yang terbit sejumlah 1.778 sehingga realisasi kinerja yang dicapai sebesar 100%. Untuk capaian tahun 2021 (Oktober-Desember) Persentase Pelaku Usaha yang Berizin tercapai 100% dari jumlah pelaku usaha yang mengurus izin 248 dan realisasi jumlah izin yang terbit sejumlah 248.

6. Persentase Izin Yang Update

<i>Indikator</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Persentase Izin yang update</i>	Target	100%	100%
	Realisasi	100%	100%
	Capaian	100%	100%

Tahun 2022 capaian persentase izin yang update sebesar 100% dengan jumlah izin yang masuk melalui OSS sejumlah 978 dan izin yang telah terbit melalui OSS



sejumlah 978 izin. Tahun 2021 Persentase Izin yang Update dengan target 100% dan realisasi 100%.

7. Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi

<i>Indikator</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi</i>	Target	-	100%
	Realisasi	0,0000023%	0,0000098%
	Capaian	0,00%	0,00%

Tahun 2022 Jumlah tenaga kerja di Kabupaten tapin sebesar 99.027 orang dengan perbandingan jumlah realisasi investasi di Kabupten Tapin Tahun 2022 yaitu Rp1.012,15 Milyar, sehingga persentase rasio yang dicapai sebesar 00,000000098%. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tapin Tahun 2021 yaitu sebesar 20.563 orang. Hasil dari rasio ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai investasi dan tenaga kerja yang terserap yaitu masih cukup rendah.

8. Persentase investasi yang lolos izin lingkungan

<i>Indikator</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Persentase investasi yang lolos izin lingkungan</i>	Target	100%	100%
	Realisasi	100%	100%
	Capaian	100%	100%

Untuk tahun 2022 persentase investasi yang lolos izin lingkungan yaitu 100%. Jumlah pelaku usaha yang wajib izin lingkungan sejumlah 978 dengan yang memnuhi izin lingkungan 978. Tahun 2021 Persentase Investasi yang lolos izin lingkungan tercapai 100% dari target pelaku usaha yang berizin 215 realisasi pelaku usaha yang lolos izin lingkungan 215.



3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	INDIKATOR	Perbandingan Realisasi Kinerja			
		Target Jangka Menengah	2022		
		Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi	525	525	1012,15	192,79%
	Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	3%	3%	11,91%	396,98%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	85	86,68	101,98%
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%	100%	100%
	Persentase izin yang update	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100%	100%	0,0000098%	0,00%
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%	100%	100%
Sumber data :					
*: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2022					
** : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Tahun 2022					

Capaian kinerja nilai investasi berdasarkan target renstra ditahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yaitu targetnya sebesar 525 milyar dan capaian nilai investasi sebesar Rp1.012,15 Milyar, melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan capaian Persentase Perumbuhan investasi pada tahun 2022 yaitu 11,91%. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan beberapa tahun sebelumnya. yaitu 2020 hingga tahun 2022 meningkat, dapat dilihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 84,15 dan pada tahun 2021 sebesar 86,57 dan tahun 2022 sebesar 86,68. Realisasi dari indikator.



3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kab. Tapin	Kinerja Kab. Tapin	Provinsi Kalsel		Nasional		% kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Provinsi	% kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Nasional	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Investor	525	1.012,15	13.000	15.290	1.200.000	1.207.200	6,62%	0,08%	
		3	-30,13%	-	-	--	-	-	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dan provinsi						
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan									
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu									
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani									
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin									
	Persentase izin yang update									
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi									
Persentase investasi yang lolos izin lingkungan										

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang masuk di Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebesar Rp 1.012,15 Milyar. Jika dibandingkan dengan total investasi secara nasional sebesar Rp 1.207.200 Milyar atau sebesar 0,08% dari total investasi seluruhnya yang masuk ke Indonesia dan realisasi investasi di Provinsi Kalsel yaitu Rp15.290 Milyar. Perbandingan realisasi Kab. Tapin dengan Provinsi Kalsel yaitu 6,62%



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil Sasaran Strategis yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran hasil dari komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DPMPTSP Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program Penunjang	Faktor Pendukung/ Penghambat	Alternatif Solusi
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi	191,79%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Faktor Penghambat <ul style="list-style-type: none"> - LKPM yang dilaporkan oleh pelaku usaha belum melakukan migrasi ke OSS RBA (versi terbaru) - Pelaku usaha salah melaporkan tambahan modal kerja - Perusahaan terlambat menyampaikan LKPM melewati batas waktu penyampaian; Perusahaan tidak rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan - Perusahaan tidak ada aktivitas penambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan setiap triwulan melalui surat kepada Pelaku Usaha untuk menyampaikan LKPM - Memberikan layanan berbantuan bagi pelaku usaha yang kesulitan migrasi ke OSS RBA - Membuat group whatsapp dengan para pelaku usaha untuk mempermudah koordinasi terkait penyampaian LKPM
	Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	396,98%			



				<p>modal sehingga tidak ada realisasi investasi di tahun berjalan</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah dilaksanakan sosialisasi tata cara pengisian LKPM kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan LKPM terjadi peningkatan yang cukup baik - Partisipasi pelaku usaha yang sudah mulai taat dalam pelaporan LKPM 	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang sinergi dengan dinas teknis terkait data potensi dan peluang investasi yang update 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi secara langsung dengan dinas teknis - Pelaksanaan fgd
			Program Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi investasi daerah belum maksimal dipromosikan. - Media promosi investasi yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, DPMPTSP Provinsi dan BKPM RI/ Kementerian Investasi terkait event-event pameran.



					- Memaksimalkan promosi peluang investasi daerah saat pelaksanaan promosi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	101,98%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Faktor Penghambat - Kurangnya PNS di bagian pelayanan Faktor Pendukung - Memaksimalkan peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia. - Adanya sistem OSS yang mempermudah penerbitan izin	- Penyediaan petugas pelayanan dari tenaga kontrak, namun diharapkan kedepannya mendapat tambahan pegawai untuk petugas pelayanan
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%			- Koordinasi secara langsung dengan dinas teknis terkait masalah rekomendasi perizinan dan anggota tim dinas teknis
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%			- Mengumpulkan bahan dan informasi terkait data dan peraturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%			
	Persentase izin yang update	100%			
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	0,0000098%			
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%			



3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMPTS masih kurang namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTS telah memaksimalkan keterbatasan tersebut, sehingga kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat/ pelaku usaha Petugas pelayanan perizinan dibantu tenaga kontrak untuk memaksimalkan SDM di DPMPTSP.

Selain itu penggunaan sistem OSS juga membantu bagi masyarakat untuk mengurus izin secara online. Mekanisme pengaduan terhadap pelayanan juga dapat diakses diberbagai media baik secara langsung maupun onlie seperti aplikasi Lapor dan social media facebook.

- **Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam melaksanakan masing-masing program dan kegiatan masih kurang , hal ini tidak didukung lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti Tempat / Ruang Pelayanan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melengkapi sarana dan prasaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan masih belum dapat maksimal dilakukan karena keterbatasan gedung kantor saat ini. Namun upaya-upaya untuk memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung telah dilakukan dengan anggaran yang tersedia, sehingga kinerja yang telah ditargetkan dapat tercapai.

- **Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp 7.289.233.975,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.062.056.513,00 dengan rata-rata realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun adalah sebesar 83,16%.



Capaian Kinerja Utama “Meningkatnya Investor” yaitu 192,97% dan Persentase Pertumbuhan Investasi mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 11,91% Sehingga dapat disimpulkan bahwa anantara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja, maka realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan sehingga DPMPTSP telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya efisiensi anggaran untuk pencapaian Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dapat dilihat bahwa capaian kerjanya lebih dari 100% atau besarnya persentase capaian “Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan” dibandingkan dengan target kinerja sebesar 101,98% dengan realisasi anggaran pada program kegiatan yang mendukung capaian sebesar 97.15% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target maka DPMPTSP Kabupaten Tapin efisien dalam penggunaan sumber daya.

Pada tabel 3.9 terlihat perbandingan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja DPMPTSP. Secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja DPMPTSP telah mencapai target yang diharapkan, sehingga DPMPTSP telah efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan dalam menunjang pencapaian kinerja. Adapun tingkat efisiensi dihitung dengan selisih antara persentase capaian kinerja dan persentase realisasi keuangan.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Program Penunjang	Realisasi Keuangan	Tingkat Efisiensi
				Kinerja (%)			
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7-5$
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi	525	1012,15	192,79%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50,95%	141,84%
	Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	3%	11,91%	396,98%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	296,98%



					Program Promosi Penanaman Modal	100%	296,95%
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65,28	331,7%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	86,68	101,98%	Program Pelayanan Penanaman Modal	97,15%	2,85%
	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%			
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%			
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%	100%			
	Persentase izin yang update	100%	100%	100%			
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100%	0,0000098	0,00%			
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%	100%			

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 hasil indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan, namun ada beberapa target yang belum dapat



dicapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran hasil dari komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DPMPTSP Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mendukung Sasaran Strategis DPMPTSP yaitu “Meningkatnya Investor”

Program ini melaksanakan kegiatan berupa Pengawasan dan Pembinaan. Sasaran pelaksanaan program kegiatan ini yaitu pelaku usaha di Kabupaten Tapin. Secara garis besar hasil dari pelaksanaan program ini mendukung dari terealisasinya nilai investasi. Program ini melaksanakan kegiatan yaitu Pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM namun masih terdapat kendala baik pengisian yang belum benar maupun penyampaian LKPM yang tidak tepat waktu. Hasil kegiatan ini dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha menyampaikan LKPM.

Pembinaan dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku usaha dalam menggunakan sistem untuk pelaporan LKPM. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini maka para pelaku usaha/perusahaan dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketaatan pelaku usaha/perusahaan di Kabupaten Tapin untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga mendukung tercapainya target investasi di Kabupaten Tapin.

Adapun penjelasan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal merupakan Upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pada kegiatan pengawasan menargetkan pada pelaku usaha yang sebelumnya telah menyampaikan LKPM namun terdapat kendala seperti ketidaktepatan dalam pengisian LKPM. Pada kondisi lapangan ditemukan bahwa masalah terkait Realisasi yang



dilaporkan oleh pelaku usaha selalu 0 (nol) rupiah. Melalui kegiatan ini maka kami dapat memberikan arahan bahwa perusahaan harusnya mengisi LKPM dengan modal kerja dan modal tetap yang ada diperusahaan.

Hasil dari kegiatan ini memberikan manfaat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya, sehingga data realisasi investasi di Kabupaten Tapin dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun daftar perusahaan yang dilakukang pengawasan penanaman modal :

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. BANNA MEGAH MANDIRI
2	PT. BERKAH LANCAR MANDIRI
3	PT. KARTA UPAYA MANDIRI
4	PT. HARAPAN WARGA MANDIRI
5	PT. HIJRAH BANUA BESTARI
6	PT. KHARISMA ALAM PERSADA
7	PT. PALNTINDO AGRO SUBUR
8	PT. UNITED TRACTORS TBK
9	PT. TARUNGIN MEMBANGUN
10	PT. INDO BORNEO PRATAMA
11	PT. SUMBER CAHAYA REZEKI UTAMA
12	PT. ANUGERAH BINUANG MULIA
13	PT. ANUGERAH MITRA KALIMANTAN
14	PT. BERKAH BANUA TAPIN
15	CV. RAWAT BUMI
16	CV. ZAM ZAM AIR MULIA
17	CV. KARYATI
18	CV. KARYA GEMILANG
19	CV. ALFARIZQI ALESHA ZHAFRAN
20	CV. AL BARAKAH MADINA ANWARI
21	CV. ALEA JAYA PERKASA
22	CV. ANUGERAH MITRA BERSAMA
23	CV. ANUGERAH PUTRA BERSAMA



Foto 3.3 Kegiatan Pengawasan ke Pelaku Usaha

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal

Kegiatan Pembinaan sebenarnya berhubungan dengan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan sebenarnya berdasarkan dari hasil turun lapangan. Karena tidak sepenuhnya Pelaku Usaha (Perusahaan) memahami dan mengetahui terkait penyampaian LKPM, bahkan tidak menyadari tentang tanggung jawab dalam penyampaian LKPM. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Pelaku Usaha dilakukan untuk memenuhi kegiatan Pembinaan. Pada saat kegiatan berlangsung, hambatan yang di hadapi saat pelaksanaan kegiatan adalah penyesuaian jadwal bimtek yang mengikuti dengan jadwal narasumber dan beberapa pelaku usaha yang diundang tidak hadir saat pelaksanaan kegiatan.

Adapun upaya agar pelaku usaha hadir dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu menekankan kepada Pelaku Usaha untuk hadir dalam kegiatan BIMTEK, karena bisa saja pada saat kegiatan berlangsung para pelaku usaha dapat memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada narasumber apabila pada saat penyampaian di temukan kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian LKPM. Upaya lain yang dilakukan yaitu memberikan konsultasi secara langsung bagi pelaku usaha yang ingin berkonsultasi dapat datang ke kantor DPMPTSP.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah selain meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya ada juga kendala atau masalah yang ditemukan, sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi pelaku usaha yang lain.



Foto 3.4 Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian LKPM



2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan promosi penanaman modal dengan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya kepada penanam modal tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tapin. DPMPTSP Kalimantan Selatan beserta DPMPTSP Kabupaten Tapin, DPMPTSP Kabupaten Batola, dan DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DPMPTSP Hulu Sungai Tengah, dan DPMPTSP Kotabaru sebagai ujung tombak investasi di Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan pameran Pekan Promosi dan Investasi Daerah bertempat di Transmart Mall – Semarang dari tanggal 22 Juni s.d 26 Juni 2022.

Peserta yang mengikuti pameran tersebut berasal dari Instansi Pusat, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dan Para Pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Semarang, kegiatan ini menekankan pada peningkatan hasil devisa dan ekspor produk-produk unggulan serta mendorong investasi dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pameran kali ini dimaksudkan untuk memberikan semangat dan pendorong dalam berkarya dan berkreasi bagi para pelaku usaha dan UMKM. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan usaha.



Foto 3.5 Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Melaksanakan Ekspose Potensi Unggulan Kabupaten Tapin ke PT. Hasnur Group pada tanggal 05 Oktober 2022.

Foto-foto kegiatan :



Foto 3.6 Ekspose Potensi Unggulan Kabupaten Tapin

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin

Dalam rangka peningkatan investasi, upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Sebagai salah satu langkah adalah dengan melakukan kegiatan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2021, dimana dengan adanya studi yang didalamnya memuat identifikasi potensi sumber daya yang dimiliki dan peta investasi, daerah dapat memberikan informasi kepada pelaku ekonomi dan investor pada umumnya secara rinci, handal dan akurat mengenai potensi riil yang

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menghasilkan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi investasi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada para investor dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengidentifikasi potensi investasi komoditas, produk dan jasa potensial pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tapin termasuk mengidentifikasi komoditas, produk, dan jasa yang cocok dikembangkan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
3. Menganalisa komoditas unggulan komoditas, produk, dan jasa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tapin yang siap ditawarkan kepada investor.
4. Menyusun ringkasan skala prioritas komoditas, produk, dan jasa unggulan untuk berinvestasi.



5. Menyajikan Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Hambatan :

- Koordinasi dengan SKPD terkait yang belum berjalan dengan baik sebagai sumber data, Ketersediaan pada data primer dan sekunder yang up date berdasarkan referensi yang ada, survei (kunjungan lapangan) dan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai data potensi dan permasalahan secara mendalam yang berkaitan dengan kondisi lapangan dimana kegiatan penelitian dilaksanakan.
- Belum adanya Sosialisasi/ Rapat Koordinasi Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin.

Solusi :

- Melaksanakan kegiatan pengumpulan literatur, referensi maupun buku-buku yang berkaitan dengan potensi di Kabupaten Tapin serta melaksanakan kegiatan survei dan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan SKPD terkait.
- Dilaksanakannya Sosialisasi/ Rapat Koordinasi Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin.

Hasil Kegiatan :

Hasil dari penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah berupa dokumen yang berisi konsep secara utuh tentang studi potensi dan peluang investasi unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang memuat Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin.

Dalam rangka penelitian pengembangan Komoditi, Produk dan Jasa unggulan di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan melalui konfirmasi dan analisa lanjutan terhadap komoditas, produk, dan jasa yang terjaring di survei tingkat kecamatan dengan pendekatan metode AHP, Borda dan Bayes diperoleh antara lain :

1. 18 (delapan belas) sektor komoditas, produk, dan jasa unggulan yang menjadi objek dari survei AHP yang meliputi :
 1. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan yang dibudidayakan.
 2. Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan.
 3. Perikanan.
 4. Pertambangan dan Penggalian.
 5. Industri Pengolahan.
 6. Konstruksi.
 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.



8. Pengangkutan dan Pergudangan.
 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.
 10. Informasi dan komunikasi.
 11. Aktivitas Keuangan dan asuransi.
 12. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
 13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya,
 14. Pendidikan.
 15. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.
 16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.
 17. Aktivitas Jasa Lainnya.
 18. Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Kepentingan Sendiri.
2. 10 Komoditas unggul lintas sektor di setiap Kecamatan.
 3. 10 Komoditas unggulan lintas sektor di Kabupaten Tapin antara lain :
 - a) Padi (Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Lain).
 - b) Jagung (Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Lain).
 - c) Penggalian pasir (Pertambangan dan Penggalian).
 - d) Karet (Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Lain).
 - e) Penggalian batu gunung (Pertambangan dan Penggalian).
 - f) Ikan Nila (Perikanan).
 - g) Kain Sasirangan (Industri Pengolahan).
 - h) Kelapa Sawit (Pertanian Tanaman. Peternakan. Perburuan dan Kegiatan Lain).
 - i) Ikan Mas (Perikanan).
 - j) Warung Makan Campur (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum).

4. Program Pelayanan Penanaman Modal



Program Pelayanan Penanaman Modal mendukung Sasaran Strategis DPMPTSP yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”.

Program ini mendukung terlaksananya tugas dan wewenang DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta pengelolaan pengaduan dari masyarakat. Dengan pelaksanaan program ini telah mendukung meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Kegiatan terdiri dari penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tenaga Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penempatan kerja pada Bagian Depan (*Front Office*) yang mengakomodir dan memberikan arahan langsung bagi pemohon izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Tenaga *Front Office* melaksanakan input data pemohon, kemudian disampaikan kepada Tenaga Back Office sebagai pengolah data perizinan sampai terbitnya Izin.



Foto 3.7 Pelaksanaan Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung

Dilaksanakannya sosialisasi penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung (PBG) melalui sistem / aplikasi SIMBG di 12 Kecamatan. Melalui sosialisasi ini para peserta dapat mengetahui :

- Kemudahan pelayanan perizinan pembangunan bangunan gedung (secara digital)
- Legalitas bangunan gedung



- Standar teknis bangunan gedung
- Perubahan IMB menjadi PBG (UU No. 11 Tahun 2020 dan PP 16 Tahun 2021)
- Perubahan sistem perizinan IMB menjadi PBG (manual menjadi online / SIMBG)
- Persyaratan teknis bangunan

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupten Tapin Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pemecahan masalah Perizinan dan Non Perizinan sesuai bidang teknis / sektor masing-masing yang di sahkan oleh Bupati Tapin. Rapat teknis di Kantor DPMPTSP Kabupaten Tapin untuk membahas terkait Permohonan Izin yang masuk dan penerbitan Rekomendasi Teknis oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Teknis.

SKPD Teknis menyampaikan perkembangan informasi terkait perubahan-perubahan peraturan terbaru menyangkut syarat teknis perizinan di Kabupaten Tapin. Rapat yang dilaksanakan sekaligus mengevaluasi kekurangan dan/atau kelemahan selama proses perizinan berlangsung mulai permohonan masuk, penerbitan rekomendasi oleh Dinas Teknis hingga penerbitan Izin untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tapin. Hasil dari kegiatan ini untuk meunjang Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk perizinan dan Non Perizinan sesuai sektor masing-masing dalam memenuhi persyaratan penerbiatan izin.

Jumlah izin yang diterbitkan tahun 2022

No	Nama Izin		TOTAL
1	Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	33
2	Izin Usaha Industri	IUI	0
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	IUJK	0
4	Surat Izin Apotek	SIA	8
5	Surat Izin Praktik Bidan	SIPB	137
6	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	SIPB-M	6
7	Surat Izin Praktik Dokter	SIPD	63



8	Surat Izin Praktik Dokter Mandiri	SIPD-M	28
9	Surat Izin Praktik Dokter Spesial	SIPDS	15
10	Surat Izin Praktik Fisioterapis	SIPF	1
11	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	SIPRO	4
12	Izin Klinik		4
13	Surat Izin Praktik Perawat	SIPP	151
15	Surat Izin Praktik Apoteker	SIPA	23
16	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Lab. Medik	SIP-ATLM	26
17	Surat Izin Praktik Gigi dan Mulut	SIPTGM	5
18	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	SIPTTK	19
19	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian Mandiri	SIPTTK-M	1
20	Surat Izin Terdaftar Penyehat Tradisional	STPT	0
21	Toko Obat		0
22	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	SIP-E	3
23	SURAT IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS	SIPRM	6
24	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	SIPTGz	21
25	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	SPPIRT	37
26	Reklame		70
27	Izin Operasional TK & PAUD		123
28	Penelitian		17
29	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat	PKBM	3
30	Izin Pengelolaan Air Limbah	IPAL	1
31	Izin Tempat Pembuangan Sementara B3	TPS-B3	1
32	Tanda Daftar Gudang	TDG	0
33	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDUP	3
34	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	0
35	Izin Trayek		1
36	Online Single Submission	OSS	978
Total			1788

3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyusunan laporan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) sebagai sarana penunjang atau sebagai alat ukur sejauh mana pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah telah memenuhi Standar Pelayanan yang harus diberikan untuk para pemohon izin. Adapun manfaat dari dilaksanakannya penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat / para pemohon izin dapat terukur, bagi penyelenggara perizinan sebagai sarana evaluasi, inovasi untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Hasil dari kegiatan ini tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Tapin. terselesaikannya pengaduan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan di bidang penanaman modal melalui aplikasi SP4N Lapor.



Foto 3.8 Koordinasi Penyusunan Laporan SKM

Dari hasil SKM yang disusun tersebut dapat diketahui nilai survei per unsur pelayanan, nilai survei kepuasan masyarakat dan evaluasi serta prioritas peningkatan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mutu dan kinerja pelayanan berada dalam kategori **BAIK**, yaitu dengan **NILAI INDEKS 86,68**. Nilai ini dikonversi dengan pedoman sebagai berikut :



3.10 Tabel Rata-rata Nilai Masing-masing Unsur SKM

No	Unsur SKM	Nilai Per	Kinerja Per Unsur Pelayanan
		Unsur Pelayanan	
1	Persyaratan	3,41	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,55	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,51	Baik
4	Biaya / tariff	3,52	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,52	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,62	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,46	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,46	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,48	Baik
Total Ideks		3,47	BAIK
86,68			

Sumber data : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2022

PERSYARATAN

Survei menunjukkan Persyaratan menunjukkan hasil mutu pelayanan B (baik). Persyaratan dalam memberikan pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah baik, namun hal ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu dan kategori survei kepuasan masyarakat. Persyaratan pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah transaran dengan dibuatnya banner di ruang masuk pintu pelayanan serta sesuai dengan persyaratan. Namun untuk meningkatkan nilai di bidang persyaratan yaitu dengan adanya sosialisasi dan publikasi tentang persyaratan di media cetak, media elektronik, dan media sosial, agar responden mengetahui persyaratan pelayanan tanpa datang ke kantor DPMPTSP Tapin.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem, mekanisme, dan prosedur dengan hasil mutu pelayanan B, dan kinerja unsur pelayanan Baik, Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam memberikan pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah baik, namun hal ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu dan kategori survei kepuasan masyarakat. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah transaran dengan dibuatnya banner di ruang masuk pintu pelayanan serta



sesuai dengan Sistem, mekanisme, dan prosedur.

Sistem, mekanisme, dan prosedur serta persyaratan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hal ini dikarenakan setiap ada Sistem, mekanisme, dan prosedur selalu ada persyaratan sebagai penjelasnya. Namun untuk meningkatkan nilai di bidang Sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu dengan adanya sosialisasi dan publikasi tentang persyaratan di media cetak, media elektronik, dan media sosial, agar responden mengetahui Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan tanpa datang ke kantor DPMPTSP Tapin, serta membuat sistem, mekanisme, dan prosedur yang ringkas agar responden dapat dipermudah.

WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan dengan hasil mutu pelayanan B, dan kinerja unsur pelayanan Baik. Waktu Pelayanan dalam memberikan pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah baik dan cepat, namun hal ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu dan kategori survei kepuasan masyarakat. Standar waktu Pelayanan di DPMPTSP Tapin sudah transparan dengan ditempelnya dan disosialisasikannya kepada karyawan dan responden di muka ruang informasi. Namun untuk meningkatkan nilai di bidang Waktu Pelayanan agar responden tidak menumpuk di ruang pelayanan dapat mempersingkat waktu pelayanan.

BIAYA DAN TARIF

Biaya dan tarif dengan hasil mutu pelayanan B, dan kinerja unsur pelayanan Baik dan peringkat paling rendah. Biaya dan tarif dalam memberikan pelayanan di DPMPTSP Tapin dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pungutan lain. Jumlah biaya dan tarif juga transparan dengan tersedianya informasi biaya melalui banner di ruang pelayanan yang diberikan kepada responden. Hal ini merupakan wujud komitmen DPMPTSP Tapin dalam menuju Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Biaya dan tarif perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat dengan cara sosialisasi dan publikasi tentang biaya dan tarif di media cetak, media elektronik, dan media sosial, agar responden mengetahui biaya dan tarif pelayanan tanpa datang ke kantor DPMPTSP Tapin.



PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN

Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan hasil mutu pelayanan B, dan kinerja unsur pelayanan Baik. Pada unsur ini harus menjadi perhatian lebih, mengingat nilai pemeringkatan masih dalam kategori baik. Produk spesifikasi jenis pelayanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat, dengan cara sosialisasi dan publikasi tentang produk spesifikasi jenis pelayanan di media cetak, media elektronik, dan media sosial, serta membuat pengumuman produk spesifikasi jenis pelayanan seperti Neon Box dimuka pintu masuk lingkungan DPMPTSP Tapin.

KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana pelayanan dengan hasil mutu pelayanan B. Pada unsur ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat kompetensi pelaksana sangat penting bagi kegiatan pelayanan kepada responden. Karyawan di DPMPTSP Tapin sudah sangat kompeten, mengingat mayoritas karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana.

Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat, dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang pelayanan satu pintu seperti sosialisasi menurut peraturan hukum yang berlaku, mengevaluasi petugas pelayanan agar selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada responden.

PERILAKU PELAKSANA

Perilaku pelaksana merupakan unsur survei kepuasan masyarakat yang tujuh dan dengan nilai pemeringkatan ke 2 (dua). Nilai unsur pelayanan ini sebesar 3,565. nilai rata-rata tertimbang 0,396. mutu pelayanan A, dan kinerja unsur pelayanan Sangat Baik. Pada unsur ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat perilaku pelaksana sangat penting bagi kegiatan pelayanan kepada responden. Perilaku pelaksana di DPMPTSP Tapin sudah sangat sopan dan ramah, mengingat adanya arahan dan perbaikan berkelanjutan dari pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada responden.

Perilaku pelaksana perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat, dengan cara selalu mengawasi dan memberikan



pendidikan dan pelatihan kepada karyawan seperti tatacara berpakaian dan bertutur kata agar selalu memberikan pelayanan yang sangat sopan dan ramah terhadap responden. Adanya evaluasi terhadap karyawan juga dapat meningkatkan kinerja khususnya dibidang perilaku karyawan serta selalu menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada responden.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan hasil mutu pelayanan B. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan sudah sangat baik, mengingat pada pintu masuk ruang pelayanan sudah terdapat tempat untuk Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan di DPMPTSP Tapin dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung melalui petugas khusus pada Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. sedangkan pengaduan secara tidak langsung melalui SMS.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat, dengan cara menyediakan website/aplikasi yang langsung dapat diisi oleh responden. Selain itu dengan adanya website/aplikasi tersebut responden juga dapat mengetahui profil seperti sejarah, persyaratan, tata cara pelayanan di DPMPTSP Tapin .

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasana dengan hasil mutu pelayanan B. Pada unsur ini harus ditingkatkan, mengingat sarana dan prasarana sangat penting bagi kegiatan pelayanan kepada responden. Sarana dan prasarana di DPMPTSP Tapin sudah baik, mengingat ketersediaan yang mencukupi dalam kegiatan pelayanan, seperti wc, full ac, WIFI, dan parkir yang luas dan bersih.

Sarana dan parasarana perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat, dengan cara membuat garis batas parkir agar rapi dan teratur, menambah WC, membuat parkir khusus disabilitas/lansia agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada responden.

4. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah

1. Sosialisasi Kebijakan

Adapun maksud dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Kemudahan Berusaha di Daerah Dalam Upaya Mendorong Percepatan Realisasi Investasi di Kabupaten Tapin adalah memberikan pengetahuan kepada para peserta tentang kebijakan-kebijakan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan bagi para pelaku usaha dimana dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut akan memotivasi terbukanya peluang usaha baru dan menciptakan daya tarik serta daya saing bagi para penanam modal maupun calon penanam modal di Kabupaten Tapin.



Foto 3.9 Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kemudahan Berusaha

Hasil dari pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kemudahan Berusaha di Daerah Dalam Upaya Mendorong Percepatan Realisasi Investasi di Kabupaten Tapin adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam memfasilitasi peraturan dan kebijakan pelaksanaan penanaman modal. Selain itu juga untuk membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan perusahaan serta adanya kemudahan pelaku usaha dalam mengurus perizinan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan Demikian secara otomatis dapat meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tapin.

2. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Berbasis Resiko

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Berbasis Resiko adalah:

- Mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, serta perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi.
- Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Perizinan Berusaha di Daerah sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



Foto 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

3. Penyusunan Bahan Kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal

Maksud dari penyusunan bahan kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal adalah :

- a. Sebagai dasar/arah kebijakan dalam perencanaan tahunan dan strategi mencapai target realisasi investasi di Kabupaten Tapin.
- b. Sebagai dasar / arah kebijakan pemberian insentif terhadap penanaman modal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin.
- c. Sebagai dasar / arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan potensi Kabupaten Tapin.

Hasil dari penyusunan bahan kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal di tahun 2023. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti

tumbuh kalau sektor-sektor dibawahnya bekerja dengan baik, termasuk sisi sektor produksi yaitu industri. Ini berarti akan mempercepat penyebaran investasi di Kabupaten Tapin, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Tapin.



Foto 3.11 Koordinasi penyusunan bahan kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran Anggaran Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp. 7.144.024.007,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.062.056.513,00**.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.858.627.575,00	Rp. 4.884.404.062,00	83,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 41.315.000,00	Rp. 39.215.000,00	94,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 41.315.000,00	Rp. 39.215.000,00	94,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.509.018.075,00	Rp. 2.939.538.272,00	83,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.471.448.175,00	Rp. 2.903.508.272,00	83,64



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp. 37.569.900,00	Rp. 36.030.000,00	95,90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.123.898.600,00	Rp. 1.031.995.588,00	91,82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 140.289.000,00	Rp. 139.164.148,00	99,20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 103.353.800,00	Rp. 102.319.000,00	99,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 14.400.000,00	Rp. 14.177.300,00	98,45
Penyediaan Bahan/Material	Rp. 41.156.800,00	Rp. 32.878.200,00	79,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 824.699.000,00	Rp. 743.456.940,00	90,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Rp. 642.212.700,00	Rp. 552.384.000,00	86,01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 317.754.900,00	Rp. 312.558.000,00	98,36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 324.457.800,00	Rp. 239.826.000,00	73,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 298.959.800,00	Rp. 181.318.038,00	60,65
Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Rp. 2.726.000,00	Rp. 2.712.000,00	99,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 189.518.400,00	Rp. 73.186.638,00	38,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 106.715.400,00	Rp. 105.419.400,00	98,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 243.223.400,00	Rp. 139.953.164,00	57,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 91.352.400,00	Rp. 72.674.164,00	79,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 19.650.000,00	Rp. 9.685.000,00	49,29
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya.	Rp. 132.221.000,00	Rp. 57.594.000,00	43,56
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 23.898.000,00	Rp. 23.898.000,00	100,00
Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten / kota	Rp. 23.898.000,00	Rp. 23.898.000,00	100,00



Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. 23.898.000,00	Rp. 23.898.000,00	100,00
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 44.994.000,00	Rp. 44.994.000,00	100,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 44.994.000,00	Rp. 44.994.000,00	100,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 44.994.000,00	Rp. 44.994.000,00	100,00
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 891.579.400,00	Rp. 866.143.100,00	97,15
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 891.579.400,00	Rp. 866.143.100,00	97,15
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik	Rp. 286.385.000,00	Rp. 280.768.700,00	98,04
Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Rp. 305.385.000,00	Rp. 293.250.000,00	96,03
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Rp. 110.880.800,00	Rp. 104.295.800,00	94,06
Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah	Rp. 188.928.600,00	Rp. 187.828.600,00	99,42
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 448.535.000,00	Rp. 228.517.351,00	50,95
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 448.535.000,00	Rp. 228.517.351,00	50,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 395.735.000,00	Rp. 215.517.200,00	54,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 52.800.000,00	Rp. 13.000.151,00	24,62



6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 21.600.000,00	Rp. 14.100.000,00	65,28
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 21.600.000,00	Rp. 14.100.000,00	65,28
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	Rp. 21.600.000,00	Rp. 14.100.000,00	65,28
	Rp. 7.289.233.975,00	Rp. 6.062.056.513,00	83,16



BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2022 Sasaran Strategis DPMPTSP ada dua yaitu (1) Meningkatnya Investor dan (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan. Pengukuran kinerja dengan kategori yang mengacu pada rentang capaian lebih dari 100% kategori Baik Sekali (BS), lebih dari 75% s.d 100% kategori Baik (B), 55% s.d 75% kategori Cukup (C), Kurang dari 55% kategori Kurang (K).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Investor dengan capaian kinerja lebih dari 100% pada indikator yang pertama yaitu Nilai Investasi dan indikator kedua yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi tercapai melebihi 100%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama “**Meningkatnya Investor**” dicapai dengan kategori **Baik Sekali**.

2. Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Capaian Kinerja 100%.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**” dicapai dengan kategori **Baik Sekali**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP telah memnuhi kinerja yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan tantangan. Hasil dari capaian kinerja DPMPTSP tidak terlepas dari komitmen dan usaha yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Dukungan sarana prasaran dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas



pokok dan fungsi DPMPTSP dan memaksimalkan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

4.2 EVALUASI

Tingkat pencapaian sasaran tersebut ada yang masuk kategori Baik maka perlu dipertahankan dan tidak berhasil perlu ditingkatkan agar selalu dapat tercapai.

Banyak faktor yang mempengaruhi /menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

1. Kurang optimalnya koordinasi teknis dengan SKPD terkait
2. Belum ditetapkan Perbup Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan terbaru
3. Keterbatasan Tenaga SDM yang ada di DPMPTSP baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas
4. Masih Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan
5. Kurangnya promosi produk unggulan yang ada di Kabupaten Tapin
6. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapin
7. Masih rendahnya kesadaran dalam menerima investor luar karena pengarus sosial budaya masyarakat setempat.
8. Rendahnya daya beli masyarakat dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin yang masih rendah.
9. Sumber daya alam yang semakin lama semakin berkurang.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka Kami sebagai Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan solusi :

1. Diusahakan di Tahun 2023 sudah dilakukan updating Perbup perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
2. Updating regulasi Penanaman Modal
3. Akan diusahakan dengan mengajukan perencanaan anggaran yang sistematis dalam setiap tahunnya.
4. Pada saat Perencanaan Anggaran, diusulkan untuk penambahan sarana dan prasarana yang kurang.
5. Perlunya promosi yang lebih intensif untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Tapin. Selain itu melaksanakan forum ataupun seminar bisnis sebagai wadah untuk promosi dan pengembangan iklim investasi.



6. Mendukung pemerintah Kabupaten Tapin dalam membangun inspatruktur yang mendukung dan selaras dengan kebutuhan untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya.
7. Mendukung pemerintah Kabupaten tapin dalam menyiapkan sumberdaya manusia dengan pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dalam lapangan pekerjaan, maka pembangunan di Kabupaten Tapin akan lebih cepat.
8. Memberikan kemudahan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tapin dalam hal perizinan usaha.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah:

1. Mempertahankan , meningkatkan capaian kinerja yang baik dan efisien,
2. Mempertajam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan indikator kinerja dan target grup yang jelas, sehingga memudahkan Satuan Kerja dalam mencapainya .
3. Mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja dan pengukurannya pada masing-masing Satuan Kerja, sehingga pengukuran kinerja dapat terukur dengan baik.

Demikian penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2022 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Tapin dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Rantau, Februari 2023



Ryza Ramadie, SE
NIP 19740315 200003 1 004



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman (By. Pass) Rantau – Kalimantan Selatan 71111
Email. bpmptsptapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570 /26/ DPMPSTSP / 2022

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN SAKIP PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupate Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;

2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;
4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17... Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapin,



RYZA RAMADIE, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 570/p6/ DPMPTSP / 2022
TANGGAL : 17. Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DID LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas
2.	KETUA	Sekretaris Dinas
3.	SEKRETARIS	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	TIM TEKNIS	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan4. Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Analis Kebijakan2. Pranata komputer3. Pelaksana

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17. Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapin,



RYZA RAMADIE, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman (By. Pass) Rantau – Kalimantan Selatan 71111
Email. bpmptsptapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570/25/DPMPTSP/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupate Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin merupakan acuan yang digunakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Januari 2022

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin,



RYZA RAMADIE, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala DPMPTSP

Nomor : 570/25/DPMPTSP/ 2022

Tanggal : Januari 2022

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP				
Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	LKPM	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n - \text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n_{-1}}{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n_{-1}} \times 100\%$		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan - Perizinan	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Rekap Pengaduan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan

	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan (Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	Hasil survey Kepuasan masyarakat	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	$\frac{\text{Jumlah izin yang terbit}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase izin yang update	$\frac{\text{Jumlah Izin yang Terbit Melalui OSS}}{\text{Jumlah Izin yang masuk di sistem OSS}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	$\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$	LKPM, Dinas Tenaga Kerja	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	$\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin Lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin Lingkungan}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan dan Data Pelaku Usaha	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan/ Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

I N S P E K T O R A T

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
R A N T A U

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(AKIP) TAHUN 2021

Nomor 700/Reg/090/AKIP/Wil.III/VIII/NSP/2022
Tanggal 25 Agustus 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/Reg/090/AKIP/Wil.III/VIII/INSP/2022

25 Agustus 2022

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
di
Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **66,15** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot 2020	Nilai 2020	Bobot 2021	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	27,43	30	23,70
b. Pengukuran Kinerja	25	18,75	30	21,00
c. Pelaporan Kinerja	15	11,14	15	10,95
d. Evaluasi Internal	10	2,59	25	10,50
e. Capaian Kinerja	20	13,33		
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,25	100	66,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan penetapan target yang dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan keterlibatan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
3. Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
4. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena belum terdapat bukti nyata Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
5. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, namun data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
6. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sehingga belum optimal dalam memicu perbaikan kinerja;
7. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sehingga setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

8. Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kinerja, namun belum direviu secara internal;
9. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya karena belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;
10. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja;
11. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih berupa evaluasi program dan evaluasi rencana aksi;
12. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar karena belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
13. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya dan pendalaman yang memadai;
14. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
15. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target;
2. Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat perencanaan kinerja;
3. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan dengan membuat pedoman/SOP jika terjadi kesalahan data;
4. Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;
5. Menyempurnakan pengukuran capaian kinerja dengan membuat analisis relevansi dan kecukupan data kinerja;

6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;
7. Menjadikan pencapaian kinerja dalam pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan setiap pegawai;
8. Melaksanakan revidi internal terhadap dokumen laporan kinerja;
9. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian utama Pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pelaporan kinerja;
10. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
11. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja;
12. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, minimal sop evaluasi kinerja internal;
13. Meningkatkan kompetensi evaluator internal dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;
14. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
15. Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



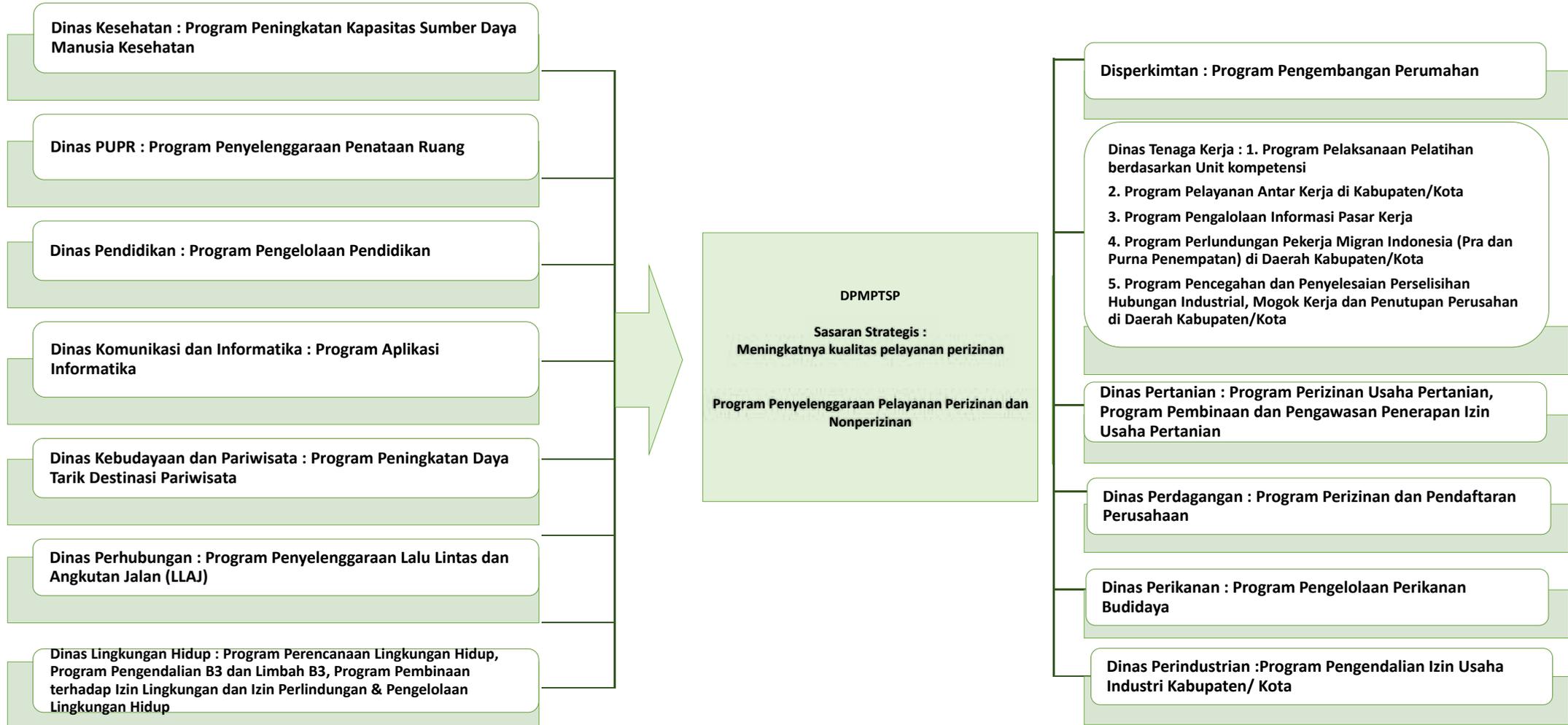
Inspektur,

Unda Absori, SH.MH

Pembina Tk.I

NIP.19700722 200501 1 013

CROSS-CUTTING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN



ANALISA PENETAPAN TARGET KINERJA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Analisa
1	Meningkatnya Investor	<p style="text-align: center;">Nilai Investasi (Milyar Rp)</p> $\frac{\text{Investasi PMA/PMMDN Thn } n - \text{Investasi PMA/PMMDN Thn } n-1}{\text{Investasi PMA/PMMDN Thn } n-1} \times 100\%$	525 3%	<ul style="list-style-type: none"> Proses penetapan target nilai investasi merupakan hasil pembagian target dari Nasional, kemudian dibagi ke masing-masing Provinsi, dan provinsi menargetkan Kabupaten Tapin sebesar 525 Milyar. Dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan investasi salah satunya pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia secara umum. Hal ini mengakibatkan aktivitas dan kegiatan ekonomi terbatas disegala sektor, sehingga pertumbuhan investasi pun melambat.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	85	<ul style="list-style-type: none"> Target Nilai Kepuasan Pelayanan Perizinan berdasarkan Renstra DPMP TSP 2018-2023
		<p style="text-align: center;">Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$	100%	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penrebitan izin yang tepat waktu PTSP Kab. Tapin berusaha maksimal sehingga target dan capaian kinerjanya 100%. Namun bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kedepannya terus berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan baik secara online dan juga off line.
		<p style="text-align: center;">Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani</p> $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	100%	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat PTSP Kab. Tapin mempunyai petugas yang khusus memberikan layanan pengaduan baik secara online dalam hal ini melalui aplikasi LAPOR dan juga menangani pengaduan secara offline. Dalam tahun 2022 pelayanan perizinan dilakukan semaksimal sehingga meminimal kan pengaduan.
		<p style="text-align: center;">Persentase Pelaku Usaha yang berizin</p> $\frac{\text{Jumlah izin yang terbit}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin}} \times 100\%$	100%	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaku usaha yang berizin pada tahun 2022 target 100%, pelayanan perizinan terus berusaha agar pelayanan yang diberikan maksimal baik perizinan secara online ataupun offline bagi pelaku usaha yang mengurus izin.
		<p style="text-align: center;">Persentase izin yang update</p> $\frac{\text{Jumlah Izin yang Terbit Melalui OSS}}{\text{Jumlah Izin yang masuk di sistem OSS}} \times 100\%$	100%	<ul style="list-style-type: none"> Untuk persentase izin yang update dengan target tahun 2022 sebesar 100%, diharapkan pelaku usaha di Kab. Tapin dapat mengurus dan memiliki NIB.

			<ul style="list-style-type: none"> • Indikator persentase rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi target sebesar 100%
		<p>Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi</p> $\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$	100%
		<p>Persentase investasi yang lolos izin lingkungan</p> $\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin Lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin Lingkungan}} \times 100\%$	100%
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase investasi yang lolos izin lingkungan pada tahun 2022 targetnya 100%. Hal ini akan terus dipertahankan kedepannya, karena sangat penting bagi pelaku usaha harus memenuhi kewajiban izin lingkungan sebelum izin tebit.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

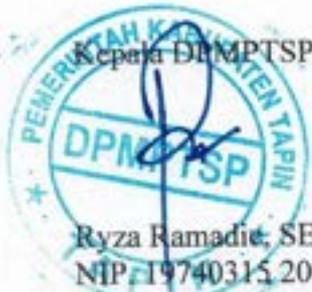
Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp. dan Fax (0517) 2035936

email. bpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.bpmpmsp.tapin@gmail.com

ANALISA RELEVANSI DAN KECUKUPAN DATA KINERJA

DAFTAR KEBUTUHAN DATA KINERJA		RELEVANSI DAN KECUKUPAN
SEKRETARIAT	Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	1. Rekap Izin yang Diterbitkan Tahun 2022 2. Laporan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3. Buku tamu konsultasi perizinan	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	1. Rekap Pengaduan Tahun 2022 2. Laporan SKM Tahun 2022 3. Laporan Kegiatan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 3. Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 4. Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja

	Fasilitas/Insentif Daerah (Penyusunan Perda)	
BIDANG INFORMASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Rekap LKPM Tahun 2022 2. Laporan Kegiatan Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Daftar Perusahaan yang dilakukan Pengawasan	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. Laporan Kegiatan Promosi tahun 2022 2. Laporan Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif 3. Laporan FGD Peta Potensi	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja


 Kepala DPMPTSP,
 Ryza Ramadie, SE
 NIP. 19740315 200003 1 004

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan,


 Syamsul Bakhri, SE
 NIP. 19750422 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp/Fax. (0517) 2035936

email. bpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapin@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dari : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Tanggal : 20 Februari 2023
Nomor : 900/ *ca* /DPMPTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tapin merupakan unsur pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) untuk Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam perkembangannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin perlu melakukan review terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2022, kami mohon arahan dan petunjuk dari Bapak dan Ibu untuk melakukan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Atas arahan dan petunjuknya diucapkan terima kasih.

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan,

Syamsul Bakhri, SE
NIP. 19750422 201001 1 013

Pendapat Sekretaris DPMPTSP

Sudah sesuai dengan ketentuan penyusunan Perubihan 21/2 23

Keputusan Kepala DPMPTSP

Laksanakan sesuai arahan surat bapelitbang 21/2 23

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Januari 2022
Jam / Pukul : 09.00 s.d selesai
Pembahasan : Penentuan PK (Perjanjian Kinerja) dan Laporan SAKIP

Awal Tahun Anggaran 2022 ada beberapa laporan yang harus disusun baik yang berkenaan dengan keuangan ataupun yang berkenaan dengan pelaporan, diantaranya yaitu laporan Keuangan, Laporan LKPJ, LPPD dan SAKIP. Dalam komponen laporan SAKIP juga memuat Perjanjian Kinerja (PK). Seperti tahun-tahun yang lalu keterlibatan bidang-bidang sangat diperlukan dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut Kasubbag Perencanaan dan Keuangan telah membuat surat permohonan resmi secara intern untuk permintaan data diantaranya :

1. Untuk kelengkapan Laporan LKPJ dan LPPD bidang-bidang segera melaporkan hasil kegiatan tahun sebelumnya baik dari segi anggaran, capaian kinerja serta faktor-faktor yang membuat kegiatan tersebut berhasil ataupun belum berhasil. Diminta juga rekapitulasi dari capaian ataupun kinerja selama tahun sebelumnya.
2. Untuk laporan keuangan tahunan diperlukan data yang berhubungan dengan aset, maka dalam hal ini bagian yang menangani aset untuk segera membuat laporan serta melakukan penyusutan aset sehingga bagian keuangan dapat segera melakukan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan aset tersebut.
3. Sedangkan untuk laporan SAKIP diperlukan data yang berkenaan dengan nilai investasi pada tahun sebelumnya baik dari laporan LKPM ataupun dari data BKPM RI (Kementerian Investasi). Selain itu juga tiap individu di SKPD DPMPSTSP membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Untuk pengisian Perjanjian Kinerja format akan diberikan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. Pengisian akan dilakukan sendiri

oleh yang bersangkutan yang ditandatangani sehingga menjadi dasar kertas kerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dalam membuat Perjanjian Kinerja.

4. Tahun 2021 ini ada beberapa tambahan IKU DPMPTSP yang ditetapkan sesuai dengan arahan evaluator dari Kemenpan RB yaitu bapak Ananda Juarsa, IKU tersebut sudah mulai di berikan pada evaluasi tahun 2021 yaitu :

IKU DPMPTSP SETELAH ASISTENSI DENGAN KEMENPAN RB Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP				
Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	LKPM	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n - \text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n-1}{\text{Investasi PMA/PMDN Tahun } n-1} \times 100\%$		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Rekap Pengaduan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan (Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	Hasil survey Kepuasan masyarakat	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Persentase izin yang update	$\frac{\text{Jumlah izin yang Update Tahun } n}{\text{Jumlah izin Tahun } n-1 - \text{Izin yang masih berlaku Tahun } n} \times 100\%$	Rekap izin yang diterbitkan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

	Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi	$\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$	LKPM, Dinas Tenaga Kerja	Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	$\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin Lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin Lingkungan}} \times 100\%$	Rekap Izin yang diterbitkan dan Data Pelaku Usaha	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan/ Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Investor (PMDN/PMA)	Nilai Investasi (PMDN/PMA) (milyar Rp)	904
		Persentase Pertumbuhan Investasi (%)	3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	84,5
		Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100
		Persentase pelaku usaha yang berizin	100
		Persentase izin yang update	100
		Persentase rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	100
		Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100

5. Capaian IKU tahun 2021 baru dapat terealisasi laporannya pada awal tahun 2022

Capaian IKU Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rp)	510	904,43
		$\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n - \text{Investasi PMA/PMDN Thn } n-1 \times 100\%}{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n-1}$ $\frac{904,17 - 1.294,39 \times 100\%}{1.294,39}$	3%	-30,17%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	84,5	86,57
		Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit tepat waktu $\frac{\text{Jumlah izin yang di terbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$ $\frac{333}{333} \times 100\%$	100	100
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	100	100
		Persentase Pelaku Usaha yang berizin $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang berizin}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal}} \times 100\%$ $\frac{318}{348} \times 100\%$	100	100
		Persentase izin yang update $\frac{\text{Jumlah izin yang Update Tahun } n}{\text{Jumlah izin Tahun } n-1 - \text{Izin yang masih berlaku Tahun } n} \times 100\%$ $\frac{XXXXX}{XXXXX - XXXXX} \times 100\%$ * Belum ada data	-	-
		Persentase Rasio Angka Kerja yang terserap terhadap nilai investasi $\frac{\text{Angka Kerja}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$ $\frac{20.563}{904.434.344.073} \times 100\%$ * Belum ada data	100	0,00000022
		Persentase investasi yang lolos izin lingkungan $\frac{\text{Pelaku Usaha yang lolos Izin lingkungan}}{\text{Pelaku Usaha yang Wajib Izin lingkungan}} \times 100\%$ $\frac{2:5}{2:5} \times 100\%$	100	100

6. Sehubungan dengan adanya surat dari Sekretariat daerah Nomor : 050/03-Sekrt/Bappelitbang tentang pelaporan SAKIP Pemda dan perangkat daerah TA 2021. Maka setiap Kabid dan Kasi segera melaporkan capaian kinerja tahun 2021, sebagai bahan dalam pembuatan laporan SAKIP perangkat daerah.

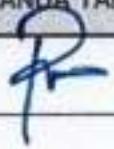
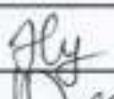
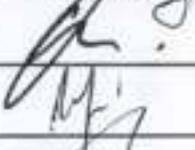
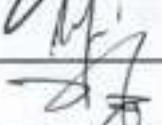
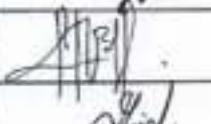
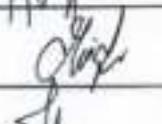
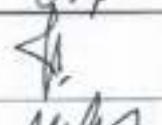
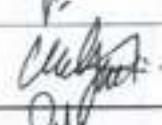
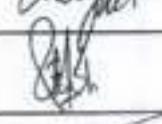
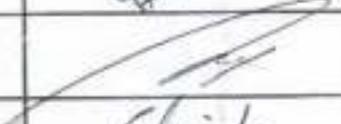
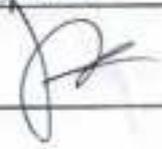
Dibuat oleh,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Syamsul Bakhri, SE

DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Januari 2022
 Jam / Pukul : 09.00 s.d Selesai
 Pembahasan : Penentuan Pk (Perjanjian Kinerja) da

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryo Kandi Geric	L	Kadis	
2				
3	Syamsul Bahuri	L	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
4				
5	Hj. Helba Xuliana	P	Kabid PKPL	
6	Debby Esti Mutia.	P	Kabid Pengendalian Pm	
7	DEWI EKA A	P	Kabid P3PM	
8	M. YUSUF	L	Kasubag. Umpeg	
9	H. AGUS SERYANAN	L	JFAR	
10	JUMJEMAN	L	Analisis Kebijakan	
11	Dina Juliani	P	Staff	
12	Maira Davi Eka Putri	P	Back Office	
13	Misfe Sari	P	Back office	
14	A. Najmuddin w	L	Back Office	
15	Mariyana	P	JFT. Analisis kebijakan	
16	RUSNA MAHRITA	P	JFT ANALIS KEBIJAKAN	
17	Widya Sulthana	P	Back Office	
18	Siti Fatimah	P	Back Office	
19	Noni Dita F.	P	Back Office	
20	Eliza Delza V	P	Back Office	
21	M. KASIP RIZHANI	L	Back OFFICE	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Age Andriani.l.	L	Back Office	
23	Siti Thurul Maripah	P	Back Office	
24	Rina perwati	P	Back office	
25	Ana Fitriana	P	TP	
26	IWAN SETIAWAN	L	Staff	
27	Arini Nova Sari	P	Front Office	
28	Hamede Chintya patri	P.	Front Office	
29	Enny Perzian P	P	Back Office	
30	DENNY RUSKIOI	L	Back Office	
31	Ahmad Riad	L	Back office	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telp.(0517) 31016 Fax. 31435

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 050 / 03 - Sekr/Bappelitbang
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pelaporan SAKIP Pemda dan Perangkat Daerah TA 2021

Rantau, 03 Januari 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur
3. Para Kepala Badan/Dinas
4. Sekretaris DPRD
5. Kasatpolpp & Damkar
6. Dir RSUD Datu Sanggul
7. Para Camat

di -
Rantau

Sehubungan dengan kegiatan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, maka diminta kepada Saudara untuk melakukan Pelaporan SAKIP Pemda dan OPD Tahun Anggaran 2021 dengan perihal pelaporan jenis dokumen sebagaimana (*terlampir*). Batas waktu penyampaian pelaporan untuk OPD paling lambat pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 dan untuk Pemda pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021 yaitu berupa soft copy disampaikan kepada masing-masing mitra kerja Bappelitbang untuk dilakukan evaluasi atas kelengkapan dan kesesuaian laporan.

Soft copy file yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai akan dilakukan upload pada : esr.menpan.go.id dan esakip.tapinkab.go.id

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
H. MASYRANI ANSYAH, SP, M.MA, MP
Pembirja Utama Madya
NIP. 19650422 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Yth Bapak Wakil Bupati Tapin (Sebagai laporan)

SAKIP 2021

I. TIME SCHEDULE & DOKUMEN PELAPORAN SAKIP OPD
TAHUN ANGGARAN 2021

JADUAL PENYUSUNAN	JADUAL VERIFIKASI	JADUAL UPLOAD
10 s.d 31 Januari 2022 (Semua OPD)	01 s.d 19 Februari 2022 (OPD dan Mitra Bidang Bappolifbang)	20 s.d 28 Februari 2022 (OPD dan Mitra Bidang Bappolifbang)

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	SK TIM SAKIP 2021	SK TIM yang telah ditandatangani Kepala OPD
2	LKjIP 2021 (Disertai tindaklanjut hasil evaluasi APIP)	Data dukung hasil perhitungan atau pengukuran pada pencapaian PK dan IKI tahun 2021 berdasarkan penjabaran rumus pada kerangka logis kinerja
3	Cross Cutting OPD	Menyusun Kinerja OPD lintas sektor
4	LHE SAKIP 2021	Hasil Reviu APIP
5	Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triw I s.d IV Tahun 2021	Disertai data dukung berupa dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan undangan rapat pada Triw I s.d IV
5	Monev Capaian Renstra Tahun 2021	Disertai data dukung berupa dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan undangan rapat pada Triw I s.d IV
6	Monev IKI Triwulan I s/d IV Tahun 2021	Disertai data dukung berupa dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan undangan rapat pada Triw I s.d IV

II. TIME SCHEDULE & DOKUMEN PELAPORAN SAKIP PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2021

JADUAL PENYUSUNAN	JADUAL VERIFIKASI	JADUAL UPLOAD
01 s.d 28 Februari 2022 (TIM SAKIP PEMDA)	01 s.d 19 Maret 2022 (TIM SAKIP PEMDA)	20 s.d 31 Maret 2022 (TIM SAKIP PEMDA)

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	SK TIM SAKIP PEMDA 2021	SK TIM yang telah ditandatangani Ketua Tim (Sekretaris Daerah)
2	LKJIP PEMDA 2021 (Disertai tindak lanjut hasil evaluasi Kemenpan RB)	Data dukung hasil perhitungan atau pengukuran pada pencapaian PK Kepala Daerah tahun 2021 berdasarkan penjelasan rumus pada kerangka logis kinerja
3	LHE SAKIP PEMDA 2021	Hasil Reviu Kemenpan RB
4	Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triw I s.d IV PEMDA Tahun 2021	Disertai data dukung berupa dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan undangan rapat TIM SAKIP pada Triw I s.d IV
5	Monev Capaian RPJMD Tahun 2021	Disertai data dukung berupa dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan undangan rapat TIM SAKIP pada Triw I s.d IV
6	Cascading dan Cross Cutting RPJMD	Melakukan Penyusunan Cascading dan Crosscutting RPJMD lintas sektor

Catatan :

1. Bagi OPD yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atas tatacara pemenuhan dokumen tersebut dapat berkoordinasi secara langsung dengan masing-masing mitra bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
2. Diminta kepada Anggota Tim SAKIP Kabupaten Tapin dapat memfasilitasi dengan baik dalam hal pemenuhan dokumen dimaksud.

DOKUMENTASI RAPAT





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

H. Agus Setyawan, ST
ANALIS KEBIJAKAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I

Rantau, April 2022

KEPALA DPMPPTSP

RYZA RAMADIE, SE





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Maulana Hidayat, ST
ANALIS KEBUAKKAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan II

Rantau, Juli 2022

KEPALA DPMPPTSP

RYZA RAMADIE, SE





DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Syamsul Bakhri, SE

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan III

Rantau, Oktober 2022
Kepala DPMP TSP



RYZA RAMADIE, SE



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

MARIYANA, SE
ANALIS KEBIJAKAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan IV

Rantau, Desember 2022
Kepala DPMP TSP



RYZA RAMADIE, SE



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Hj. Mella Siswanti, ST, MT

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I

Rantau, April 2022

KEPALA DPMPPTSP



RYZA RAMADIE, SE



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Debby Estimutia, SE

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan II

Rantau, Juli 2022
KEPALA DPMP TSP

RYZA RAMADIE, SE





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Dewi Eka Aryani, SH

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan III

Rantau, Oktober 2022
KEPALA DPMPPTSP
RIZZA RAMADIE, SE





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Ismail Fahmi, S.AP

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

ATAS CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan IV

Rantau, Kalimantan Tengah Desember 2022

KEPALA DPMP TSP

RYZA RAMADIE, SE





**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

ARINI NOVIA SARI

Sebagai Petugas Pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin

RANTAH KOTAKOBER 2022

KEPALA DINAS RMPPTSP



RYZA RAMADIE, SE



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

HERLI MULLIANA LESTARI

Sebagai Petugas Pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin

RANTAUKABUPATEN SEPTEMBER 2022

KEPALA DINAS PMPTSP



RYZA RAMADIE, SE



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

MEDIE ANDRIANSYAH

Sebagai Petugas Pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin

RANTAU, APRIL 2022

KEPALA PINAS PMPTSP



RYZA RAMADIE, SE



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

HAMEDA CHINTYA

Sebagai Petugas Pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin

RANTAU, JULI 2022

KEPALA DINAS PMPTSP



RYZA RAMADIE, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmpptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpptsp.tapinkab.co.id
Rantau

SURAT TUGAS
Nomor : 090/ 90 /ST/2021

DASAR : No. 080/516/BAGOR

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	H. TAUPIQURAHMAN, S.Sos, ME 19711005 199803 1 011	Pembina TK. I IV/b	Sekretaris
2.	SYAMSUL BAKHRI, SE 19750422 201001 1 013	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	DINA JULIANI, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda III/a	Pelaksana

Maksud Surat Tugas :

Keperluan	Mengikuti Bimtek SAKIP dan RB
Tempat tujuan	Kab. Banjar
Berlaku mulai tanggal	16 Juni s.d 18 Juni 2021 / 3 (tiga) Hari
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Umum
Pembebanan biaya ST	5.2.2.15.02

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 15 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

SURAT TUGAS
Nomor : 090/52/ST/2021

DASAR : No. 050/174-Sekrt/Bappelitbang

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	H. TAUPIQURAHMAN, S.Sos, ME 19711005 199803 1 011	Pembina TK. I IV/b	Sekretaris
2.	SYAMSUL BAKHRI, SE 19750422 201001 1 013	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	DINA JULIANI, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda III/a	Pelaksana

Maksud Surat Tugas :

Keperluan	Mengikuti Asistensi Penyusunan SAKIP OPD
Tempat tujuan	Banjarmasin
Berlaku mulai tanggal	8 Juli s.d 10 Juli 2021 / 3 (tiga) Hari
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Umum
Pembebanan biaya ST	5.2.2.15.02

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 7 juli 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin

Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

SURAT TUGAS
Nomor : 090/075/SPT/2021

DASAR : 050/247-Sekr/Bapellitbang

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	H. TAUFIQURAHMAN, S.Sos, ME 19711005 199803 1 011	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris
2.	SYAMSUL BAKHRI, SE 19750422 201001 1 013	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	DINA JULIANI, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda III/a	Pelaksana

Maksud Surat Tugas :

Keperluan	Mengikuti Adistensi SAKIP OPD
Tempat tujuan	Banjarmasin
Berlaku mulai tanggal	01 Oktober s.d 03 Oktober 2021 / 3 (tiga) Hari
Alat angkutan yang dipergunakan	Mobil Dinas
Pembebanan biaya ST	5.2.2.15.02

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 28 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmpts.tapin@gmail.com web. www.bpmpts.tapinkab.co.id
Rantau

SURAT TUGAS
Nomor : 090/131/ST/2021

DASAR : No. 050/350-Sekt/Bappelitbang

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	SYAMSUL BAKHRI 19750422 201001 1 013	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	DINA JULIANI, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda III/a	Pelaksana
3.	MAIRITA DEWI EKA PUTRI		PTT

Maksud Surat Tugas :

Keperluan	Asistensi PMPRB Pemerintah Kabupaten Tapin
Tempat tujuan	Jakarta
Berlaku mulai tanggal	11 Nov s.d 14 Nov 2021 / 4 (empat) Hari
Alat angkutan yang dipergunakan	Pesawat Udara dan Angkutan Umum
Pembebanan biaya ST	5.2.2.15.02

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 09 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmpstapin@gmail.com web. www.dpmpstapin.co.id
Rantau

SURAT TUGAS
Nomor : 090/157/ST/2021

DASAR : No. 050/311-Sekt/Bappelitbang

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	SYAMSUL BAKHRI 19750422 201001 1 013	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	DINA JULIANI, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda III/a	Pelaksana

Maksud Surat Tugas :

Keperluan	Mengikuti sosialisasi Pembangunan ZI dan lanjutan Asistensi SAKIP 2021
Tempat tujuan	Jakarta
Berlaku mulai tanggal	02 Des s.d 04 Des 2021 / 3 (tiga) Hari
Alat angkutan yang dipergunakan	Pesawat Udara dan Angkutan Umum
Pembebanan biaya ST	5.2.2.15.02

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

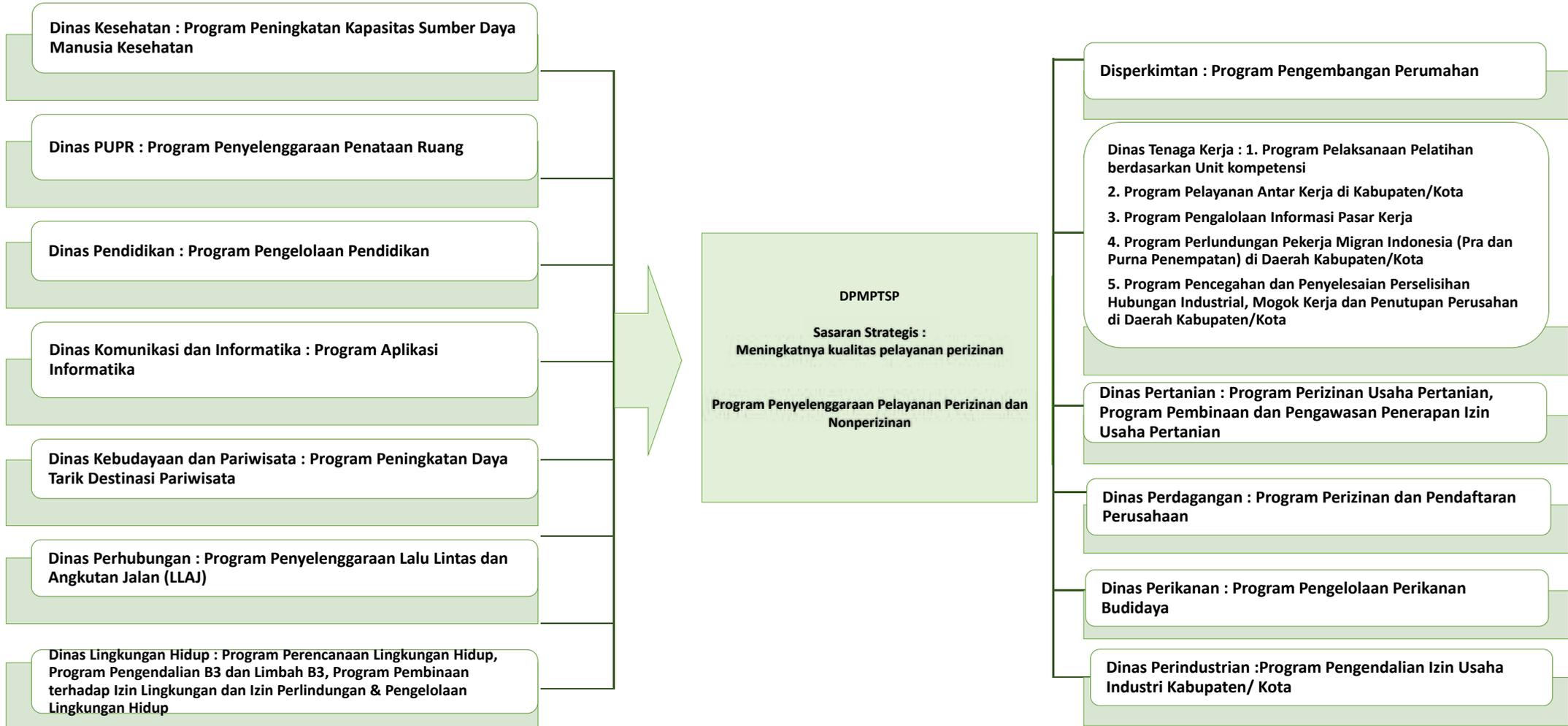
Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 30 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

CROSS-CUTTING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN



**MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

Kategori Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Sasaran (Misi dan Tujuan)	Target Kinerja Peringkat Daerah Tahun 2022										Realisasi Kinerja Peringkat Daerah Tahun 2022													
				2019					2020					2021					2022								
				K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj	K	Pj						
Meningkatnya Investor	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Misi Investasi (Misi-1)	841	Rp. 423.465.544	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Penyelesaian Perizinan Investasi	1%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN DATA DAN SISTEM INFORMATIKA PENANAMAN MODAL	Misi Investasi (Misi-1)	841	Rp. 2.040.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	PROGRAM PEMERIKSAAN BELANJA PENANAMAN MODAL	Misi Investasi (Misi-1)	841	Rp. 103.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Misi Investasi (Misi-1)	841	Rp. 22.771.812	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROMOSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85,8		81	81,8	84,8	86	88,2	89,2	90,2	91,2	92,2	93,2	94,2	95,2	96,2	97,2	98,2	99,2	100	100	100	100	100	100	
		Penyelesaian perizinan dan persyaratan yang telah legal online	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyelesaian Pengalihan masyarakat yang terganggu	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyelesaian Pelaku Usaha yang terancam	100%	Rp. 742.716.242,00	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyelesaian lain yang update	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyelesaian Riwayat Angka Putus yang terganggu akibat nilai investasi	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyelesaian investasi yang telah ada di lingkungan	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR IKU	TARGET IKU				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	ANGGARAN	Realisasi Kinerja								Penanggungjawab
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	131,25	131,25	131,25	131,25	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	448.535.000	232,8	Milyar Rupiah	593,59	Milyar Rupiah	758,69	Milyar Rupiah	1012,15	Milyar Rupiah	Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase Pertumbuhan PMA / PMDN	-	-	-	3%		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN		-	%	-	%	-	%	11,91	%	
						2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merajai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan persik lain yang menyampaikan LKPM tepat waktu	448.535.000	152	%	104	%	100	%	96	%	
						2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dibina	895.735.000	-	%	27,00	%	33,00	%	38	%	
						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	52.800.000	152	%	104	%	100	%	96	%	
						2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	25.896.000	232,8	%	593,59	%	749,69	%	1012,15	%	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
						2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tagin	25.896.000	50	%	50	%	100	%	100	%	
						2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peluang penanaman modal daerah yang teridentifikasi	25.896.000	1	Buah	2	Buah	2	Buah	2	Buah	
							Jumlah koordinasi perencanaan, pengembangan penanaman modal		1	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	
						2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	38.994.000	232,8	%	593,59	%	749,69	%	1012,15	%	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
						2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	38.994.000	-	%	0	%	100	%	100	%	

						2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peluang penanaman modal yang dik promosikan	38.994.000	-	Buah	0	Buah	2	Buah	2	Buah	Penanaman Modal
						2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	460.580.000	232,8	%	593,59	%	749,69	%	1032,15	%	Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata pelaksanaan pelayanan informasi pendukung informasi penanaman modal dan perizinan	21.600.000	25	%	50	%	75	%	100	%	
						2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Dimasukkan	21.600.000	3	Dokumen	6	Dokumen	9	Dokumen	12	Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	-	-	85 poin	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	891.579.400	-	Poin	-	Poin	-	Poin	86,68	Poin	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	
	Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%		Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu		100	%	100	%	100	%	100	%		
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani		100	%	100	%	100	%	100	%		
	Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%	100%	100%		Persentase Pelaku Usaha yang berizin		100	%	100	%	100	%	100	%		
	Persentase izin yang update	100%	100%	100%		Persentase izin yang update		100	%	100	%	100	%	100	%		
	Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	-	-	100%		Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi		-	%	-	%	-	%	0,0000000	%		
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%	100%	100%		Persentase investasi yang lolos izin lingkungan		100	%	100	%	100	%	100	%		
					2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	891.579.400	371	izin	731	izin	1229	izin	1788	izin		

						Persentase jumlah pengaduan yang terselesaikan		100	%	100	%	100	%	100	%	
						Updating regulasi penanaman modal		-	%	-	%	-	%	100	%	
						2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah sosialisasi layanan penanaman modal	188.978.600	-	kal	-	kal	1	kal	1	kal
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	130.680.800	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang
						2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tapin	305.385.000	3	kal	6	kal	9	kal	12	kal
							Jumlah pemenuhan pelayanan (dok, perizinan) perizinan dan non perizinan I (Sektor Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ketenagakerjaan) yang dapat diproses		194	tan	328	tan	630	tan	1017	tan
						2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemenuhan pelayanan (dok, perizinan) perizinan dan non perizinan II (Sektor Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Perikanan) yang dapat diproses	286.385.000	177	tan	403	tan	599	tan	771	tan

Sidang
Penyenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan

Kepala DPMPSTP
Kabupaten Tapin



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
TAHUN : 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Predikat nilai evaluasi SAKIP	BB	hasil evaluasi inspektorat	-	-	B	B
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi/ Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan X 100%	25%	50%	75%	100%
3	Peningkatan kualitas SDM SKPD	Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian	100%	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat keahlian/ Jumlah ASN X 100%	-	19%	25	25%
4	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100%	Jumlah pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian/ Jumlah kebutuhan pegurusan administrasi kepegawaian X 100%	25%	50%	75%	100%
		Persentase penyerapan anggaran SKPD	100%	Jumlah anggaran yang teresrap/ Jumlah anggaran X 100%	-	-	-	83.16%
		Persentase aset yang tercatat	100%	Jumlah Aset yang tercatat/ jumlah aset X 100%	25%	50%	75%	100%

Review atas capaian kinerja :

- Tw : Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya
- Tw : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan
- Tw : Target dan Capaian Kinerja di pertahankan
- Tw : Target dan Capaian Kinerja di pertahankan



Sekretaris DPMP TSP,

Debby Estimulia, SE

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
: 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rumus Perhitungan	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar/ Jumlah Laporan Keuangan yang wajib disampaikan X 100%	33%	67%	100%	100%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti/ Jumlah temuan pemeriksaan X 100%	-	-	-	-
		Persentase laporan kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	Jumlah laporan kinerja yang sesuai target dan tepat waktu/ Jumlah laporan kinerja yang wajib disampaikan X 100%	64%	86%	93%	100%
		Nilai hasil evaluasi SAKIP	BB	Nilai hasil evaluasi inspektorat	-	-	B	B

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 : Kinerja untuk DPMPTSP Kab. Tapin triwulan I sudah sesuai target
 Tw 2 : Kinerja untuk DPMPTSP Kab. Tapin triwulan II meningkat menjadi 66,6%
 Tw 3 : Realisasi di triwulan III Kinerja DPMPTSP sudah melebihi target
 Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Sekretaris DPMPTSP,

Debby Estimulia, SE



Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

Syamsul Bakhtl, SE



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Tersedianya kulansi SPJ belanja kegiatan	Jumlah kulansi SPJ belanja kegiatan	400	-	138	357	638	999
2	Tersedianya SPP Ganti Uang	Jumlah SPP Ganti Uang	12	-	2	5	7	12
3	Tersedianya SPP LS (Langsung)	Jumlah SPP LS (Langsung)	26	-	11	22	30	79
4	Tersedianya SPP Uang Persediaan	Jumlah SPP Uang Persediaan	1	-	1	1	-	1
5	Tersedianya SPP Tambah Uang	Jumlah SPP Tambah Uang	2	-	-	2	3	7
6	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	Jumlah SPP Ganti Uang Nihil	1	-	-	2	3	1
7	Tersedianya Tambah Uang Nihil	Jumlah Tambah Uang Nihil	2	-	-	2	3	7
8	Terlaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	Jumlah input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400	-	138	357	638	999
9	Terlaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	Jumlah Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150	-	50	100	78	-
10	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	Jumlah laporan pertanggung jawaban bulanan	12	-	3	6	3	12
11	Tersedianya laporan penutupan kas	Jumlah laporan penutupan kas	12	-	3	6	3	3
12	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	Jumlah bahan pembuatan Laporan Keuangan	2	-	1	2	1	2

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 : Tingkatkan kinerja
 Tw 2 : Kinerja sudah baik, perlu lebih teliti dan hati-hati dalam ngimputan data
 Tw 3 : Target tahun 2023 dinaikan, karena untuk target tahun 2022 sudah tercapai ditriwulan 3.
 Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

Bendahara Pengeluaran,



Syamsul Bakhril, SE

Fathur Rahman Basile, A.Md



LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
: 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rumus Perhitungan	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	Persentase data laporan kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	Jumlah Data laporan kinerja yang tersedia tepat waktu/ Jumlah data laporan kinerja yang dibutuhkan x 100%	64%	86%	93%	100%
2	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	Persentase data laporan keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	Jumlah Data laporan keuangan yang tersedia tepat waktu/ Jumlah data laporan keuangan yang dibutuhkan x 100%	33%	67%	100%	100%
3	Tersedianya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	Persentase administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	Jumlah berkas spj yang diperiksa/ Jumlah berkas SPJ X 100%	100%	100%	100%	100%

Review atas capaian kinerja:

- Tw 1: Kinerja baik dan pertahankan
- Tw 2: Capaian kinerja sudah baik, pertahankan
- Tw 3: Target dan capaian kinerja pertahankan
- Tw 4: Target dan capaian kinerja pertahankan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

Pelaksana/ Penata Keuangan

Syamsul Bakhtl, SE



Dina Juliani, SE



LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
: 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Terlaksananya tertib administrasi data kepegawaian	Persentase Pegawai ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian/ Jumlah ASN X 100%	100%	19%	38%	44%	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Memadai	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Barang Milik Daerah X100 %	100%	85%	82%	82%	82%
3	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan/ Jumlah ASN X 100%	90%	-	19%	25%	25%

Review atas capaian kinerja :

Tw 1 : Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya

Tw 2 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan

Tw 3 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan

Tw 4 : Target dan Capaian Kinerja di pertahankan

Sekretaris DPMPPTSP,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Debby Estimulia, SE

M. Yusuf, SE

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
TAHUN : 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Meningkatnya perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal	1. Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin 2. Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan 3. Persentase Fasilitas Mitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	100% 100% 100%	Potensi dan Peluang Investasi yang tersusun/Potensi dan Peluang Investasi Kab. Tapin X 100% Jumlah potensi dan peluang Penanaman Modal yang dipromosikan/ Jumlah potensi dan peluang penanaman modal X 100% Jumlah UMKMK yang difasilitasi mitraan /Jumlah pemohon fasilitas mitraan UMKMK X 100%	50%	100%	100%	100%
					-	100%	100%	100%

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 :**
- Potensi dan peluang Inventasi yang tersusun : Padi, Jagung, penggalan pasir, karet, penggalan batu gunung.
 - Potensi dan peluang Inventasi Kab. Tapin : Pertanian (Perternakan, Perkebunan, perikanan, kehutanan), pariwisata, transportasi perdagangan & jasa, pendidikan
- Tw 2 :**
- Potensi dan peluang Inventasi yang tersusun : ikan nila (Perikanan), kain sasirangan (Industri Pengolahan), kelapa sawit, ikan mas, warung makan campur (Penyediaan Akomodasi).
 - Potensi dan peluang Inventasi Kab. Tapin : kesehatan, industri, konstruksi, jasa keuangan, komifto & lingkungan hidup.
- Tw 3 :**
- Fasilitasi mitraan antara Cake Khas Tapin a.n Ibu Sanati dengan PT. Binuang Mitra Bersama, Jumlah potensi & peluang PM yang dipromosikan sebanding lurus dengan Jumlah potensi & peluang PM antara lain 10 komoditas yang tergambar diatas didokumentasikan dalam buku & brosur sebagian berupa produk / display bahan pameran.
- Tw 4 :**
- Jalan Potensi & Peluang PM yang di Promosikan berbanding lurus dengan jalan potensi & peluang PM antara lain 10 komoditas yang tergambar di atas dan di dokumentasikan dala buku dan brosur sebagian berupa produk/display bahan pameran



Kabid Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Peranaman Modal.

Dewi Ekawaty, SH

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
: 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rumus	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Meningkatnya jumlah potensi dan peluang penanaman modal	1. Jumlah koordinasi perencanaan, pengembangan penanaman modal 2. Jumlah peluang penanaman modal daerah yang teridentifikasi	2 2	- -	1	2	2	2

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 : Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal dengan Dinas Pertanian Kab. Tapin terkait data potensi unggulan Kab. Tapin sektor Pertanian, Peluang Penanaman Modal teridentifikasi padi dan jagung hibrida.
- Tw 2 : Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin terkait data potensi pariwisata Kab. Tapin, Peluang Penanaman Modal teridentifikasi Religi dan Danau di Desa Hatwin.
- Tw 3 : Target dan capaian kinerja pertahankan
- Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal,

Dewi Elbarviani, SH

Analisis Kebijakan,

Mariyana, SE

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
: 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Meningkatnya promosi peluang penanaman modal	1. Jumlah peluang penanaman modal yang di promosikan 2. Jumlah Fasilitasi Kemitraan UMKM	2 1	- -	- -	- 1	2 1	2 1

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 :** Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya
- Tw 2 :**
- Fasilitas Kemitraan UMKM antara Cake Khas Tapin dengan ownernya ibu Santiati dengan PT. Binaung Mitra Bersama di DPMPTSP kab. Tapin pada bulan April 2022.
 - Dilaksanakan MOU fasilitasi kemitraan Cake Khas Tapin dengan PT. Binaung Mitra Bersama pada tanggal 19 Mei 2022 PT. Binaung Mitra Bersama memberikan bantuan alat produksi pada tanggal 02 Juni 2022 di kantor PT. BMB, Binaung sebagai realisasi dari fasilitasi kementerian dan sejalan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT. BMB.
- Tw 3 :** Target dan capaian kinerja pertahankan
- Tw 4 :** Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal,

Dewi Eke Aryanl, SH

Kabid Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal,

Dewi Eke Aryanl, SH

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	600	-	371	731	1229	1788

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 :**
- Dengan pelayanan perizinana melalui aplikasi OSS membantu mempermudah proses pelayaan perizinan, sehingga redisasi penerbitan izin cukup tinggi.
 - Pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS beberapa kali mengalami gangguan, sehingga masih ada pelayanan yang kurang maksimal.
- Tw 2 :**
- Kualisasi penerbitan izin pada triwulan II meningkat dibandingkan dengan Triwulan I, khususnya pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS.
 - Penlesaian perizinana sudah sesuai SOP dn standar pelayanan perizinan dan non Perizinan pada DPMP TSP Kab. Tapin.
- Tw 3 :**
- Ada penurunan ralisasi penerbitan izin pada triwulan III di bandingkan dengan triwulan II
 - Penerbitan izin yang diproses secara manual masih lebih banyak dari sektor kesehatan (izin praktek tenaga kesehatan)
- Tw 4 :** Target dan capaian kinerja pertahankan



Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan,


Ismail Fahmi S. AP

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bid. Ekonomi (Sektor Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ketenagakerjaan)	1. Jumlah pemenuhan pelayanan (dok. permohonan) perizinan dan non perizinan I (Sektor Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ketenagakerjaan) yang diproses. 2. Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab. Tapin	250 12 kali	-	194 3	330 6	632 9	1017 12

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 :**
- Pelayanan Perizinan melalui Aplikasi OSS beberapa kali mengalami gangguan, sehingga Pelayanan tidak berjalan optimal.
 - Pelaksanaan rapat tim teknis perizinan dan non perizinan sesuai perencanaan, untuk menghasilkan rekomendasi / saran / kebijakan pada masing - masing sektor.
- Tw 2 :**
- Tingkat Penyelesaian Perizinan di Kap. Tapin tepat waktu, sesuai SOP Standar Pelayanan Perizinan.
 - Jumlah Perizinan yang tertib melalui OSS RBA semakin meningkat.
- Tw 3 :**
- Tingkat Penyelesaian Perizinan di Kap. Tapin tepat waktu, sesuai SOP Standar Pelayanan Perizinan.
- Tw 4 :**
- Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan.


Ismail Fahri S.KP

Analis Kebijakan,


H. Agus Setyawan, ST

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TAHUN

: 2022

850	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan (Sektor Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Perikanan)	Jumlah pemenuhan pelayanan (dok. permohonan) perizinan dan non perizinan II (Sektor Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Perikanan) yang dapat diproses.	350	-	177	401	597	771

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 :** Jumlah perizinan yang diterbitkan lebih banyak dari sektor kesehatan, dan sebagian sektor pendidikan, sektor LH, PU dan sektor perikanan belum ada diterbitkan (tidak ada permohonan).
- Tw 2 :** Realisasi penerbitan izin pada Triwulan II meningkatkan dibandingkan Triwulan I izin yang diterbitkan lebih banyak dari sektor kesehatan (tenaga kesehatan) pendidikan dan sebagai izin usaha (OSS)
- Tw 3 :** Ada penurunan realisasi penerbitan izin pada Triwulan III di bandingkan Triwulan II, izin yang di terbitkan dan pekerjaan umum (PBG) dan izin usah (OSS)
- Tw 4 :** Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan,



Ismail Fahri B. AP

Analisis Kebijakan,



Maulana Hidayat, ST

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
: 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha	<p>1. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu</p> <p>2. Peningkatan pelayanan informasi pendukung informasi penanaman modal dan perizinan</p>	100%	<p>Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM/Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah inventarisasi dan updating data yang tersedia/Jumlah inventarisasi dan updating data X 100%</p>	152%	104%	100%	96,00%
			100%		100%	100%	100%	100%

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 : Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya
 Tw 2 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan
 Tw 3 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan
 Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan



Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Aryanaefi, S.Sos

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Peningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal	1. Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM 2. Persentase pelaku usaha yang dibina	100%	Jumlah perusahaan yang menyampaikan lkpm/Jumlah perusahaan yang wajib lkpm X 100% Jumlah perusahaan yang dibina/ Jumlah target perusahaan yang akan dibina X 100%	152%	104,00%	100,00%	95,00%
					-	26,88%	32,50%	37,81%

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1 : Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya
Tw 2 : Mempertahankan capaian kinerja
Tw 3 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan
Tw 4 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan

Kabid Informasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Aryanadi, S.Sos

Kasi Pemantauan, Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.



Rusna Mahrita, Amd

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI

TAHUN

: Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi penanaman modal	- Jumlah inventarisasi dan updating data penanaman modal, perizinan dan non perizinan	12 dokumen	-	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen

Review atas capaian kinerja :

Tw 1 : Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya

Tw 2 : Capaian kinerja sudah baik, pertahankan

Tw 3 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid Informasi dan Pengendalian



Aryanadi, S.Sos

Analisis Kebijakan,



Sudirman, A.Md

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
: 2022

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Rumus	Realisasi			
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Melakukan Penggandaan data dan program	Jumlah penggandaan data & program(0,013/25Kb)	100	-	20	30	55	100
2	Membuat laporan operasi Komputer	Jumlah laporan operasi komputer(0,013/laporan)	100	-	15	45	65	100
3	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	Jumlah dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer(0,048/dokumen)	100	-	20	40	60	100
4	Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	Jumlah Perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100	-	25	50	80	100
5	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	Jumlah perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100	-	10	50	80	100
6	Perekaman data (0,013/25 KB)	Jumlah Perekaman data (0,013/25 KB)	100	-	10	50	70	100
7	Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	Jumlah Perbaikan dan Pendeteksian (0,006)	150	-	30	50	90	150

Review atas capaian kinerja :

- Tw 1: Mempertahankan hasil kinerja yang sebelumnya dan meningkatkan capaian kinerja di Triwulan Selanjutnya
 Tw 2: Target dan capaian kinerja pertahankan
 Tw 3 : Target dan capaian kinerja pertahankan
 Tw 4 : Target dan capaian kinerja pertahankan

Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Pranata Komputer



Aryanadi, S.Sos



Iwan Setiawan, A.Md



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 01 / Sekr-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan I T.A 2022

Rantau, 8 April 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan I (Januari s.d Maret) tahun anggaran 2021, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan eselon IV maupun Staf DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan I T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 April 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Triya Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dmotsp.tapin@gmail.com web. www.bomptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN I

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 6 laporan dari target 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : Laporan Keuangan akhir tahun 2020 sebelum audited, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Laporan Ikhtisar	14	5	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	2	1		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja Triwulan I perizinan yang diterbitkan yaitu 371 izin dengan target 600 atau sebesar 62% dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Jumlah izin yang terbit	650	371	-	-

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan I Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, hal ini terkait jadwal pameran investasi yang dilakukan Provinsi Kalimantan Selatan baru dilaksanakan pada II dan III.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pameran investasi	2 kali	-	Masih adanya PPKM di daerah tujuan pameran	Penjadwalan ulang, rencana dilaksanakan pada triwulan II dan III
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	Pengumpulan data	Diadakan FGD untuk pembuatan peta potensi

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	0	Kegiatan bersumber dari dana DAK Non Fisik, menunggu pergeseran anggaran.	Rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah dibuat, sehingga dapat dilaksanakan setelah pergeseran anggaran
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	0	Lambatnya perusahaan dalam penyampaian LKPM (Sistem)	Mengirim surat pemberitahuan penyampaian LKPM ke perusahaan

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Penyusunan SKM belum dapat dilaksanakan karena Sistem di Sicantik belum dapat digunakan untuk survei, sehingga masih perlu menggunakan tenaga ahli untuk penyusunan SKM yang akan dianggarkan pada anggaran perubahan.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	2 dok	-	Survei menggunakan sicantik belum dapat	Survei menggunakan jasa

			dilaksanakan.	dari tenaga ahli
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	Masih berupa draf	
Jumlah aduan	10	1		Telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu.

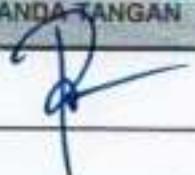
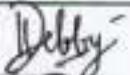
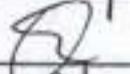
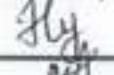
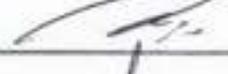
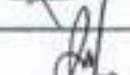
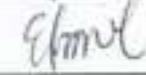
Dibuat oleh,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

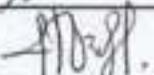
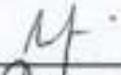


Syamsul Bakhri, SE

**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Senin, 11 April 2022
 Jam / Pukul : 09.30 s.d Selesai
 Pembahasan : Monev & Rencana Aksi Tm I

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Komadje. dC	L		
2				
3	Debby Estimutia. st	P	Kabid Informatika dan Pengendalian	
4	Syamsul Bahri	L	Koordinator Perencanaan & Keuangan	
5	H. AGUS BERMANSTAN	L	JF. Analisis Kebijakan Ahli Madya	
6	DEWI EKA A	P	Kabid PM	
7	Mariyanti	P	JF. Analisis Kebijakan	
8	Hj. Helia Xuliana	P	JF. Analisis Kebijakan	
9	MOOR AMIATI	P	Front office	
10	NONI D.F.	P.	B.O	
11	Flaweta Chintia P.	P.	Front office	
12	Arini Novio Sari	P	Front office	
13	Dina Juliani	P	staf	
14	Ana Fitriana	P	B.O	
15	Emmy Reziqiana P	P	Back Office	
16	Medie. A.	L	front office.	
17	Denny. R	L	Back office	
18	Suwarno	L	Analisis Kebijakan	
19	M. RASID RIDHANI	L	Back OFFICE	
20	Eliza Ddza V	P	Back office	
21	Rina perwati	P	Back office	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Siti Nurul Ma'rifah	P	Back Office	
23	Nisfe Sari	P	BO	
24	A. Najmudin W	L	BO	
25	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpeg	
26	Siti Fatmah	P	Back Office	
27	Age Aningsi I.	L	Back Office	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 02 /Sekrt-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan II T.A 2022

Rantau, 4 Juli 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan I (Januari s.d Maret) tahun anggaran 2021, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan eselon IV maupun Staf DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan II T.A 2021 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Ryza Rahadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. domptsp.tapin@gmail.com web. www.domptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN II

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 9 laporan dari target 16 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 sebelum audited, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I dan II.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Laporan Ikhtisar	14	5	2	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	2	1	1		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja Triwulan I perizinan yang diterbitkan yaitu 731 izin dengan target 600 atau sebesar 121% dari target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Jumlah izin yang terbit	600	371	360	-	-
Sosialisasi PBG	13 Kecamatan	-	-	Belum dianggarkan sehingga akan dilaksanakan setelah perubahan	Tw 3 s.d 4

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan II Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Rencananya pameran investasi yang kedua akan dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan pembuatan peta potensi daerah akan dilaksanakan pada triwulan ke III dikarenakan adanya perubahan isi kegiatan yang baru bisa dilaksanakan setelah adanya perubahan anggaran belanja daerah.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Pameran investasi	2 kali	-	1 kali	-	-
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	-	Adanya perubahan isi kegiatan	Pada APBD Perubahan dilaksanakan, karena adanya perubahan pada mata anggaran belanja

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	20 Pelaku usaha	-	Pembinaan terhadap pelaku usaha telah dilaksanakan.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	68%	Adanya perubahan sistem pelaporan LKPM sekarang berpindah ke OSS, sehingga ada kesulitan bagi pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Jadwal pelaksanaan Pengawasan	Memberikan layanan perbantuan OSS LKM kepada pelaku usaha

			ke perusahaan masih belum dapat dilaksanakan	melalui wa maupun secara langsung.
--	--	--	--	------------------------------------

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke III. Dalam kegiatan dibidang untuk Perbub. Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan II ini masih belum ada.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	2	-	-	-	Pelaksanaan di triwulan III
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	-	Masih berupa draf	Akan diselesaikan dalam tahun berjalan
Jumlah aduan	10	1	0		Telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu tw II dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Dibuat oleh,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



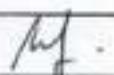
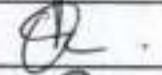
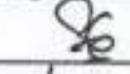
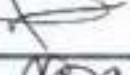
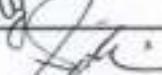
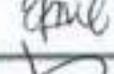
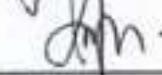
Syamsul Bakhri, SE

**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022

Jam / Pukul : 09.30 s.d. Selesai

Pembahasan : Monev & Rencana Aksi T.W. I

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Kanarie, S.E	L		
2				
3				
4	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpeg	
5	DEVUI EKA A	P	Kabag PM	
6	Syamsul Bahdin	L	Kasubbag Perencanaan & Keu	
7	Harnada Chintya P.	P.	Front Office	
8	Dina Juliani	P	PM	
9	Arini NOVIA Sari	P	Front Office	
10	H. AGUS PRATOWAN	L	JF-Analis Kebijakan Ahli mady	
11	HOOR AMIATI	P	Front Office	
12	Enny Rezqiana P	P	Back Office	
13	Hj. Helba Juliano	P	JF. Analis Kebijakan	
14	Medie. A.	L	Front Office.	
15	Noni D.F.	P.	BO	
16	Mariyana	P	JF-Analis Kebijakan	
17	DENGY PUSIBI	L	Back Office	
18	Elza Delza V	P	Back Office	
19	MUHAMMAD RASIO RIFHANI	L	Back OFFICE	
20	Ara Fitriana	P	BO	
21	SUVERMAN	L	ANALIS Kebijakan	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Rina perwah	P	Back office	Rina
23	Siti Nurul Marifah	P	Back Office	Siti
24	Misfe Sari	P	BO	Misfe
25	A. Najmudin W	L	BO	A. Najmudin
26	Siti Fatimah	P	Back office	Siti
27	Aye Anisati I.	L	Back office	Aye
28	Debby Estimulia. sc	P	Kabid Informasi dan Dm	Debby
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : / /Sekt-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan III T.A 2022

Rantau, 3 Oktober 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan III (Juli s.d September) tahun anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh ASN DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan III T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 3 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Ryza Kumbodie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEYV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN III

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 16 laporan dari 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 sebelum audited, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 audited, Laporan Keuangan Semester 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Moneyv triwulan I s.d III.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Laporan Ikhtisar	14	5	9	13	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	3	1	2	3		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III perizinan yang diterbitkan yaitu 1.229 izin dengan target 600. Pada triwulan 3 dilaksanakan Sosialisasi PBG pada 3 kecamatan.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan II	Hambatan	Tindak lanjut/ Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Jumlah izin yang terbit	600	371	360	498	-	-
Sosialisasi PBG	13 Kecamatan	-	-	3 kecamatan	-	Sosialisasi pada 9 kecamatan akan dilaksanakan pada tw 4

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan II Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah

dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Pameran investasi yang kedua tidak jadi dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan FGD pembuatan peta potensi daerah telah dilaksanakan pada triwulan ke III. Potensi dan peluang investasi yang tersusun yaitu Padi, Jagung, Penggalian Pasir, Karet dan Penggalian Batu Gunung, Ikan Nila (Perikanan, Kain Sasirangan, Kelapa Sawit, Ikan Mas, Penyediaan Akomodasi.

Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara Cake khas Tapin dengan PT. Binnuang Mitra Bersama.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Pameran investasi	2 kali	-	1 kali	-	Pembatalan dari provinsi untuk mengikuti pameran di Batam	-
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	-	1 buah	-	-

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pegawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	25 Pelaku usaha	Beberapa perusahaan yang diundang Bimtek tidak berhadir pada saat acara	Memberikan layanan konsultasi bagi perusahaan secara langsung di kantor DPMPSTP.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	112%	Adanya perubahan sistem pelaporan LKPM sekarang berpindah ke OSS, sehingga ada kesulitan bagi pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Pelaksanaan pengawasan ke Perusahaan harus melalui Sistem OSS LKPM, sebelumnya masih terkendala namun pada awal triwulan IV sudah bisa dilaksanakan.	Memberikan layanan perbantuan OSS LKM kepada pelaku usaha melalui wa maupun secara langsung. Jadwal pelaksanaan Pengawasan ke perusahaan akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Penyusunan Perda. Penanaman Modal telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan III tidak ada.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	1	-	-	-		Pelaksanaan di triwulan IV
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	-	1		Penyusunan Raperda sampai tahap uji publik, dan akan disahkan.
Jumlah aduan	10	1	0	-		Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu tw III dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Notulis,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



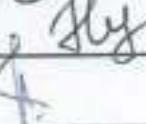
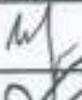
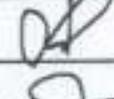
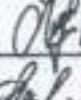
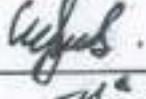
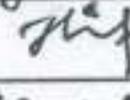
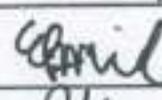
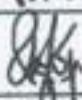
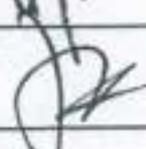
Syamsul Bakhri, SE

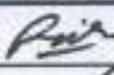
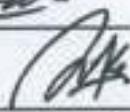
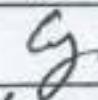
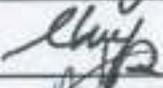
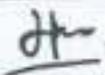
**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Selasa 3 Oktober 2022

Jam / Pukul : 09:30 sd selesai

Pembahasan : Rapat Morev Rencana Aksi A Realisasi Capaian Triwulan II TA.2022

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Ranahie,	L	Kepala Dinas	
2	Delly Esti Meha	P	sekretaris	
3				
4	AKYANAB	L	KABID	
5	Isnuil Fahmi	L	Kabid Pelayanan Perizinan	
6	DEYU EKA A	P	Kabid P3PM	
7	Hj. Helia Yuliana	P	Kabid PKPL	
	RUSNA MAHIRITA	P	JPT ANALIS KEBIJAKAN	
9	Syaiful Bahmi	L	Kasubbag Perencanaan & Kev	
10	Dina Juliani	P	Staf	
11	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpan	
12	Suderman	L	Analisis Kebijakan	
13	Maulana	L	JF Analisis Kebijakan	
14	Mariyam	P	JPT Analis Kebijakan	
15	Siti Nurul Marifah	P	back office	
16	Widya Sulthana	P	Back Office	
17	Herti Muliana Lestari	P	Back office	
18	Eliza Delza Vuyanti	P	Back Office	
19	Siti Fatmah	P	Back office	
20	Ana Fitriana	P	TP	
21	A. RASID RUDHANI	P	BO	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Ahmad Riadi	L		
23	Mor Ikhsan. S.	L	Back Office	
24	DENNY PUSALDI	L	Back office	
25	Enny Rezaiana P	P	Back OFFICE.	
26	Hanada Chintya P	P.	Pronto DPPK	
27	NOOR AMIATI	P	Front OFFICE	
28	IWAN SETIAWAN	L	STAF	
29	Muhammad yoga	L		
30	Noor Meliani	P		
31	Nadlatul humairoh	P	Back office	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 01 /Sekrt-DPMPTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan IV T.A 2022

Rantau, 02 Januari 2023

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan IV (Oktober s.d Desember) tahun anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh ASN DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan IV T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Ryza Rabbudin, SE

NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpnptsp.tapin@gmail.com web. www.bpnptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEY DAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV

Hasil Rapat :

• **Sekretariat**

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 17 laporan dari 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya: IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2022 sebelum audited, Laporan Keuangan akhir tahun 2022 audited, Laporan Keuangan Semester 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I s.d IV.

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	
	K	K	K	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	100%	98%	98%	83,37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	83,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	91,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	60,65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	57,54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84%	84%	86,01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	94,92

• **Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :**

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV perizinan yang diterbitkan yaitu 1.788 Izin dengan target 600 Izin. Pada triwulan 4 dilaksanakan Sosialisasi PBG pada 12 kecamatan.

Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85 Poin	86,68 Poin	101,98	97,15
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan	600 Izin	1.788 Izin	298%	97,15

- **Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :**

Pada triwulan III Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Pameran investasi yang kedua tidak jadi dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan FGD pembuatan peta potensi daerah telah dilaksanakan pada triwulan ke III. Potensi dan peluang investasi yang tersusun yaitu Padi, Jagung, Penggalian Pasir, Karet dan Penggalian Batu Gunung, Ikan Nila (Perikanan, Kain Sasirangan, Kelapa Sawit, Ikan Mas, Penyediaan Akomodasi.

Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara Caka khas Tapin dengan PT. Binnuang Mitra Bersama.

Rata-Rata Capaian Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100%	100%	100%	100%

- **Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :**

Triwulan I untuk kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan September sebanyak 25 Perusahaan. Dengan Pelaku Usaha yang di bina pada Kegiatan Bimtek terealisasi 43% dan Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM sebanyak 96% dari target 100%.

Nilai Investasi	525 Milyar	749,69 Milyar	142,80	50,95
Perusahaan Pemilik Izin yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100%	72%	71,67	33,93

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	65,28
Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100%	100%	100%	65,28

- **Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :**

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Penyusunan Perda. Penanaman Modal telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan IV tidak ada. Sehingga Jumlah aduan yang di terima hanya terdapat pada Triwulan I dengan 1 (satu) aduan masyarakat.

Rata-Rata Capaian Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Peluang Penanaman Modal yang Di Promosikan	100%	100%	100%	100%

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu Triwulan IV dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Notulis,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Syamsul Bakhri, SE

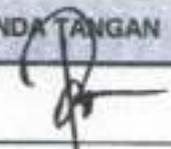
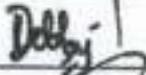
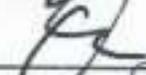
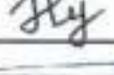
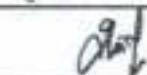
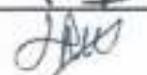
NIP. 19750422 201001 1 013

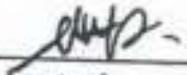
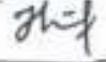
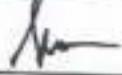
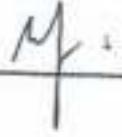
**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Rabu 4 Januari 2023

Jam / Pukul : 09.30 s.d Selesai

Pembahasan : Rapat Monor Pencana Aksi dan Realisasi Capaian Tr IV I.A 2022

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Ramadie, SE	L	Kepala Dinas	
2	Debby Estimulia, SE	P	Sekretaris	
3	Dewi Eta Anyani, SM	P	Kabid Perencanaan, Pengembangan IKT dan Promosi	
4	Anggasa	L	Kepal	
5	Mairita Devi Eka Perti	P	PTT	
6	Hj. Helda Zuliana	P	Kabid PKPL	
7	Ismail Fahmi	L	Kabid. Perizinan dan NP	
8	Syamsul Bahri	L	Kasubbag Perencana & Keu	
9	NOOR AMIATI	P	BACK OFFICE	
10	Siti Hurul M.	P	PTT	
11	Dina Jaltani	P	staf	
12	DENNY RUSADI	L	PTT	
13	Arini Novia	P	PTT	
14	Mariyana	P	JT. Analis Kebijakan	
15	Kina Perwati	P	PTT	
16	Nadlatul humairah	P	PTT	
17	Neor Ikhwan Setiawan	PR	PTT	
18	M. RASID RIDHANI	L	PTT	
19	Fathur Rahman	L	STAF	
20	Noni Dita F.	P	PTT	
21	Widya Sulthana	P	PTT	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Rusna Mahrita	P	Analisis Kebijakan	
23	Ahmad Rizki	L	Tenaga Kontrak	
24	Eliza Delza V	P		
25	IWAN SETIAWAN	L	STAF	
26	Hamedia chintya putri	P	PTT	
27	Herti Muliana Lestari	P	PTT	
28	Suwarnama	L	Analisis Kebijakan	
29	HISFE SARI	P	PTT	
30	Jalus ariani wijaya	L	PTT	
31	M-yusuf	L	Kasubag. Umpag	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

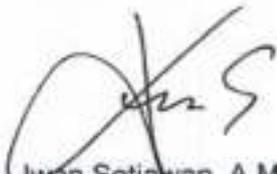
UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
 UNIT KERJA : Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 ATAS NAMA : Iwan Setiawan, Amd
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Melakukan Penggandaan data dan program (0,013/25Kb)	100 berkas	20			
2	Membuat laporan operasi komputer (0,013/laporan)	100 Laporan	15			
3	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	100 Dokumen	20			
4	Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100 berkas	25			
5	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100 berkas	10			
6	Perekaman data (0.013/25 KB)	100 berkas	10			
7	Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	150	30			

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


Debby Estimulia, SE
 19831230 201101 2 011

Rantau, April 2022
 Pranata Komputer


Iwan Setiawan, A.Md
 NIP. 197601032010011012

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
 UNIT KERJA : SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 ATAS NAMA : Fathur Rahman Ruslie, Amd
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya kuitansi SPJ belanja kegiatan	400 kuitansi	138			
2	Tersedianya SPP Ganti Uang	12 Dokumen	2			
3	Tersedianya SPP LS (Langsung)	26 Dokumen	11			
4	Tersedianya SPP Uang Persediaan	1 Dokumen	1			
5	Tersedianya SPP Tambah Uang	2 Dokumen	-			
6	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	1 Dokumen	-			
7	Tersedianya Tambah Uang Nihil	2 Dokumen	-			
8	Terfaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400 kuitansi	138			
9	Terfaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150 Laporan	50			
10	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	12 Laporan	3			
11	Tersedianya laporan penutupan kas	12 Laporan	3			
12	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	2 Laporan	1			

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Rantau, April 2022
Bendahara Pengeluaran



Syamsul Bakhri, SE
NIP. 197504222010011013



Fathur Rahman Ruslie, Amd
NIP. 198507072007011005

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
UNIT KERJA : SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ATAS NAMA : DINA JULIANI, SE
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	64			
2	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	50			
3	Terlaksananya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	25			

Kasubbag. Perencanaan dan
Keuangan



Syamsul Bakhril, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, April 2022
Penata Keuangan



Dina Juliani, SE
NIP. 199207162019032010



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 01 /Sekt-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan I T.A 2022

Rantau, 8 April 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan I (Januari s.d Maret) tahun anggaran 2021, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan eselon IV maupun Staf DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan I T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 April 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Triya Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dmotsp.tapin@gmail.com web. www.bomptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN I

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 6 laporan dari target 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : Laporan Keuangan akhir tahun 2020 sebelum audited, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Laporan Ikhtisar	14	5	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	2	1		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja Triwulan I perizinan yang diterbitkan yaitu 371 izin dengan target 600 atau sebesar 62% dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Jumlah izin yang terbit	650	371	-	-

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan I Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, hal ini terkait jadwal pameran investasi yang dilakukan Provinsi Kalimantan Selatan baru dilaksanakan pada II dan III.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pameran investasi	2 kali	-	Masih adanya PPKM di daerah tujuan pameran	Penjadwalan ulang, rencana dilaksanakan pada triwulan II dan III
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	Pengumpulan data	Diadakan FGD untuk pembuatan peta potensi

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	0	Kegiatan bersumber dari dana DAK Non Fisik, menunggu pergeseran anggaran.	Rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah dibuat, sehingga dapat dilaksanakan setelah pergeseran anggaran
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	0	Lambatnya perusahaan dalam penyampaian LKPM (Sistem)	Mengirim surat pemberitahuan penyampaian LKPM ke perusahaan

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Penyusunan SKM belum dapat dilaksanakan karena Sistem di Sicantik belum dapat digunakan untuk survei, sehingga masih perlu menggunakan tenaga ahli untuk penyusunan SKM yang akan dianggarkan pada anggaran perubahan.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	2 dok	-	Survei menggunakan sicantik belum dapat	Survei menggunakan jasa

			dilaksanakan.	dari tenaga ahli
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	Masih berupa draf	
Jumlah aduan	10	1		Telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu.

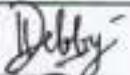
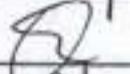
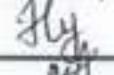
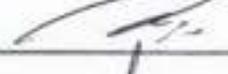
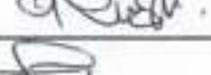
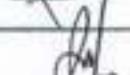
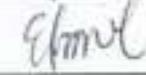
Dibuat oleh,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

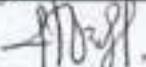
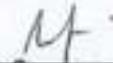


Syamsul Bakhri, SE

**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Senin, 11 April 2022
 Jam / Pukul : 09.30 s.d Selesai
 Pembahasan : Monev & Rencana Aksi Tm I

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Komadje. dC	L		
2				
3	Debby Estimutia. st	P	Kabid Informatika dan Pengendalian	
4	Syamsul Bahri	L	Koordinator Perencanaan & Keuangan	
5	H. AGUS BERMANSTAN	L	JF. Analisis Kebijakan Ahli Madya	
6	DEWI EKA A	P	Kabid PM	
7	Mariyanti	P	JF. Analisis Kebijakan	
8	Hj. Helida Xuliana	P	JF. Analisis Kebijakan	
9	MOOR AMIATI	P	Front office	
10	NONI D.F.	P.	B.O	
11	Flaweta Chintia P.	P.	Front office	
12	Arini Novio Sari	P	Front office	
13	Dina Juliani	P	staf	
14	Ana Fitriana	P	B.O	
15	Emmy Reziqiana P	P	Back Office	
16	Medie. A.	L	front office.	
17	Denny. R	L	Back office	
18	Suwarno	L	Analisis Kebijakan	
19	M. RASID RIDHANI	L	Back OFFICE	
20	Eliza Ddza V	P	Back office	
21	Rina perwati	P	Back office	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Siti Nurul Ma'rifah	P	Back Office	
23	Nisfe Sari	P	BO	
24	A. Najmudin W	L	BO	
25	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpeg	
26	Siti Fatmah	P	Back Office	
27	Age Aningsi I.	L	Back Office	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT

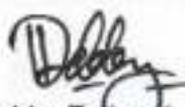


MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
 UNIT KERJA : Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 ATAS NAMA : Iwan Setiawan, Amd
 TAHUN : 2022

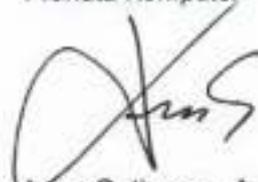
NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Melakukan Penggandaan data dan program (0,013/25Kb)	100 berkas	20	30		
2	Membuat laporan operasi komputer (0,013/laporan)	100 Laporan	15	45		
3	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	100 Dokumen	20	40		
4	Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100 berkas	25	50		
5	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100 berkas	10	50		
6	Perekaman data (0.013/25 KB)	100 berkas	10	50		
7	Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	150	30	50		

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Debby Estumia, SE
19831230 201101 2 011

Rantau, Juli 2022
Pranata Komputer



Iwan Setiawan, A.Md
NIP. 197601032010011012

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
 UNIT KERJA : SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 ATAS NAMA : Fathur Rahman Ruslie, Amd
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya kuitansi SPJ belanja kegiatan	400 kuitansi	138	357		
2	Tersedianya SPP Ganti Uang	12 Dokumen	2	5		
3	Tersedianya SPP LS (Langsung)	26 Dokumen	11	22		
4	Tersedianya SPP Uang Persediaan	1 Dokumen	1	1		
5	Tersedianya SPP Tambah Uang	2 Dokumen	-	2		
6	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	1 Dokumen	-	2		
7	Tersedianya Tambah Uang Nihil	2 Dokumen	-	2		
8	Terlaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400 kuitansi	138	357		
9	Terlaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150 Laporan	50	100		
10	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	12 Laporan	3	6		
11	Tersedianya laporan penutupan kas	12 Laporan	3	6		
12	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	2 Laporan	1	2		

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Samsul Bakhri, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, Juli 2022
Bendahara Pengeluaran



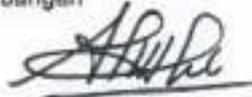
Fathur Rahman Ruslie, Amd
NIP. 198507072007011005

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
UNIT KERJA : SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ATAS NAMA : DINA JULIANI, SE
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	64	85		
2	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	50	75		
3	Terlaksananya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	25	50		

Kasubbag. Perencanaan dan
Keuangan



Syamsul Bakhril, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, April 2022
Penata Keuangan



Dina Juliani, SE
NIP. 199207162019032010



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 02 /Sekrt-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan II T.A 2022

Rantau, 4 Juli 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan I (Januari s.d Maret) tahun anggaran 2021, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan eselon IV maupun Staf DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan II T.A 2021 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Ryza Rahadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. domptsp.tapin@gmail.com web. www.domptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN II

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 9 laporan dari target 16 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 sebelum audited, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I dan II.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Laporan Ikhtisar	14	5	2	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	2	1	1		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja Triwulan I perizinan yang diterbitkan yaitu 731 izin dengan target 600 atau sebesar 121% dari target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Jumlah izin yang terbit	600	371	360	-	-
Sosialisasi PBG	13 Kecamatan	-	-	Belum dianggarkan sehingga akan dilaksanakan setelah perubahan	Tw 3 s.d 4

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan II Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Rencananya pameran investasi yang kedua akan dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan pembuatan peta potensi daerah akan dilaksanakan pada triwulan ke III dikarenakan adanya perubahan isi kegiatan yang baru bisa dilaksanakan setelah adanya perubahan anggaran belanja daerah.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
Pameran investasi	2 kali	-	1 kali	-	-
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	-	Adanya perubahan isi kegiatan	Pada APBD Perubahan dilaksanakan, karena adanya perubahan pada mata anggaran belanja

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	20 Pelaku usaha	-	Pembinaan terhadap pelaku usaha telah dilaksanakan.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	68%	Adanya perubahan sistem pelaporan LKPM sekarang berpindah ke OSS, sehingga ada kesulitan bagi pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Jadwal pelaksanaan Pengawasan	Memberikan layanan perbantuan OSS LKM kepada pelaku usaha

			ke perusahaan masih belum dapat dilaksanakan	melalui wa maupun secara langsung.
--	--	--	--	------------------------------------

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke III. Dalam kegiatan dibidang untuk Perbub. Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan II ini masih belum ada.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi		
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	2	-	-	-	Pelaksanaan di triwulan III
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	-	Masih berupa draf	Akan diselesaikan dalam tahun berjalan
Jumlah aduan	10	1	0		Telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu tw II dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Dibuat oleh,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



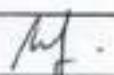
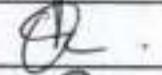
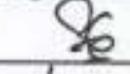
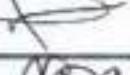
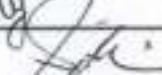
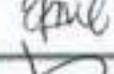
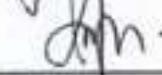
Syamsul Bakhri, SE

**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022

Jam / Pukul : 09.30 s.d. Selesai

Pembahasan : Monev & Rencana Aksi T.W. I

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Kanarie, S.E	L		
2				
3				
4	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpeg	
5	DEVUI EKA A	P	Kabag PM	
6	Syamsul Bahdin	L	Kasubbag Perencanaan & Keu	
7	Harnada Chintya P.	P.	Front Office	
8	Dina Juliani	P	PM	
9	Arini Novia Sari	P	Front Office	
10	H. Agus Setiawan	L	JF-Analis Kebijakan Ahli Muda	
11	HOOR AMIATI	P	Front Office	
12	Enny Perqiana P	P	Back Office	
13	Hj. Helba Juliano	P	JF. Analis Kebijakan	
14	Medie. A.	L	Front Office	
15	Noni D.F.	P.	BO	
16	Mariyana	P	JF-Analis Kebijakan	
17	Denny Pusri Bi	L	Back Office	
18	Elza Delza V	P	Back Office	
19	MUHAMMAD RASIO RIFHANI	L	Back OFFICE	
20	Ara Fitriana	P	BO	
21	Sulvian	L	Analisis Kebijakan	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Rina perwah	P	Back office	Rina
23	Siti Nurul Marifah	P	Back Office	Siti
24	Misfe Sari	P	BO	Misfe
25	A. Najmudin W	L	BO	A. Najmudin
26	Siti Fatimah	P	Back office	Siti
27	Aye Anziani I.	L	Back office	Aye
28	Debby Estimutia. sc	P	Kabid Informati dan Pm	Debby
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT

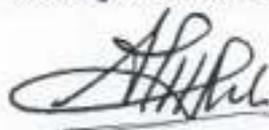


MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
 UNIT KERJA : SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 ATAS NAMA : Fathur Rahman Ruslie, Amd
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya kuitansi SPJ belanja kegiatan	400 kuitansi	138	357	638	
2	Tersedianya SPP Ganti Uang	12 Dokumen	2	5	7	
3	Tersedianya SPP LS (Langsung)	26 Dokumen	11	22	30	
4	Tersedianya SPP Uang Persediaan	1 Dokumen	1	1	-	
5	Tersedianya SPP Tambah Uang	2 Dokumen	-	2	3	
6	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	1 Dokumen	-	2	3	
7	Tersedianya Tambah Uang Nihil	2 Dokumen	-	2	3	
8	Terlaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400 kuitansi	138	357	638	
9	Terlaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150 Laporan	50	150	228	
10	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	12 Laporan	3	6	9	
11	Tersedianya laporan penutupan kas	12 Laporan	3	6	9	
12	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	2 Laporan	1	2	2	

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Syamsul Bakhri, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, Oktober 2022
Bendahara Pengeluaran



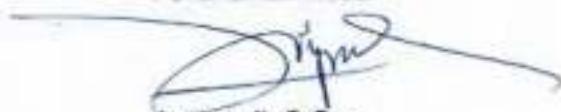
Fathur Rahman Ruslie, Amd
NIP. 198507072007011005

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
 UNIT KERJA : Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 ATAS NAMA : Iwan Setiawan, Amd
 TAHUN : 2022

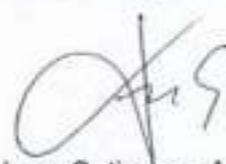
NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Melakukan Penggandaan data dan program (0,013/25Kb)	100 berkas	20	30	55	
2	Membuat laporan operasi komputer (0,013/laporan)	100 Laporan	15	45	65	
3	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	100 Dokumen	20	40	60	
4	Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100 berkas	25	50	80	
5	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100 berkas	10	50	80	
6	Perekaman data (0.013/25 KB)	100 berkas	10	50	70	
7	Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	150	30	50	90	

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

Rantau, Oktober 2022
Pranata Komputer



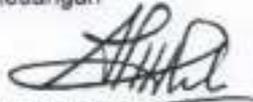
Iwan Setiawan, A.Md
NIP. 197601032010011012

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
UNIT KERJA : SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ATAS NAMA : DINA JULIANI, SE
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	64%	86%	93%	
2	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	33%	67%	100%	
3	Terlaksananya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	

Kasubbag. Perencanaan dan
Keuangan



Syamsul Bahri, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, Oktober 2022
Penata Keuangan



Dina Juliani, SE
NIP. 199207162019032010



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : / /Sekrt-DPMPTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan III T.A 2022

Rantau, 3 Oktober 2022

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan III (Juli s.d September) tahun anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh ASN DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan III T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 3 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Ryza Kumbodie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEYV DAN RENCANA AKSI TRIWULAN III

Hasil Rapat :

Sekretariat

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 16 laporan dari 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya : IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 sebelum audited, Laporan Keuangan akhir tahun 2021 audited, Laporan Keuangan Semester 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Moneyv triwulan I s.d III.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan II	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Laporan Ikhtisar	14	5	9	13	Lambatnya pengumpulan data	
Laporan Keuangan	3	1	2	3		

Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III perizinan yang diterbitkan yaitu 1.229 izin dengan target 600. Pada triwulan 3 dilaksanakan Sosialisasi PBG pada 3 kecamatan.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan II	Hambatan	Tindak lanjut/ Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Jumlah izin yang terbit	600	371	360	498	-	-
Sosialisasi PBG	13 Kecamatan	-	-	3 kecamatan	-	Sosialisasi pada 9 kecamatan akan dilaksanakan pada tw 4

Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :

Pada triwulan II Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah

dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Pameran investasi yang kedua tidak jadi dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan FGD pembuatan peta potensi daerah telah dilaksanakan pada triwulan ke III. Potensi dan peluang investasi yang tersusun yaitu Padi, Jagung, Penggalian Pasir, Karet dan Penggalian Batu Gunung, Ikan Nila (Perikanan, Kain Sasirangan, Kelapa Sawit, Ikan Mas, Penyediaan Akomodasi.

Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara Cake khas Tapin dengan PT. Binnuang Mitra Bersama.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Pameran investasi	2 kali	-	1 kali	-	Pembatalan dari provinsi untuk mengikuti pameran di Batam	-
Pembuatan peta potensi daerah	1 buah	-	-	1 buah	-	-

Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Triwulan I untuk kegiatan Pemantauan, Pegawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan	Target	Realisasi	Hambatan	Penyelesaian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	25 Pelaku usaha	Beberapa perusahaan yang diundang Bimtek tidak berhadir pada saat acara	Memberikan layanan konsultasi bagi perusahaan secara langsung di kantor DPMPSTP.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	100 %	112%	Adanya perubahan sistem pelaporan LKPM sekarang berpindah ke OSS, sehingga ada kesulitan bagi pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Pelaksanaan pengawasan ke Perusahaan harus melalui Sistem OSS LKPM, sebelumnya masih terkendala namun pada awal triwulan IV sudah bisa dilaksanakan.	Memberikan layanan perbantuan OSS LKM kepada pelaku usaha melalui wa maupun secara langsung. Jadwal pelaksanaan Pengawasan ke perusahaan akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Penyusunan Perda. Penanaman Modal telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan III tidak ada.

Kegiatan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Hambatan	Penyelesaian
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		
SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	1	-	-	-		Pelaksanaan di triwulan IV
Fasilitasi /Insentif Daerah	1	-	-	1		Penyusunan Raperda sampai tahap uji publik, dan akan disahkan.
Jumlah aduan	10	1	0	-		Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu tw III dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Notulis,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



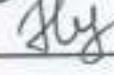
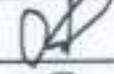
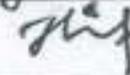
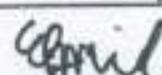
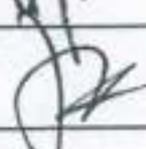
Syamsul Bakhri, SE

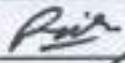
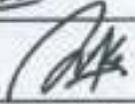
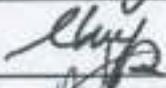
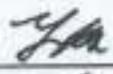
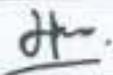
**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Selasa 3 Oktober 2022

Jam / Pukul : 09:30 sd selesai

Pembahasan : Rapat Morev Rencana Aksi A Realisasi Capaian Triwulan II TA.2022

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Ranahie,	L	Kepala Dinas	
2	Delly Esti Meha	P	sekretaris	
3				
4	AKYANAB	L	KABID	
5	Isnuil Fahmi	L	Kabid Pelayanan Perizinan	
6	DEYU EKA A	P	Kabid P3PM	
7	Hj. Helia Yuliana	P	Kabid PKPL	
	RUSNA MAHIRITA	P	JPT ANALIS KEBIJAKAN	
9	Syaiful Bahmi	L	Kasubbag Perencanaan & Ken	
10	Dina Juliani	P	Staf	
11	M. YUSUF	L	Kasubbag. Umpan	
12	Sudirman	L	Analisis Kebijakan	
13	Maulana	L	JF Analisis Kebijakan	
14	Mariyam	P	JPT Analis Kebijakan	
15	Siti Nurul Marifah	P	back office	
16	Widya Sulthana	P	Back Office	
17	Herti Muliana Lestari	P	Back office	
18	Eliza Delza Vuyanti	P	Back Office	
19	Siti Fatmah	P	Back office	
20	Ana Fitriana	P	TP	
21	A. RASID RUDHANI	P	BO	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Ahmad Riadi	L		
23	Mor Ikhsan. S.	L	Back Office	
24	DENNY PUSALDI	L	Back office	
25	Enny Rezaiana P	P	Back OFFICE.	
26	Hanada Chintya P	P.	Pronto DPPLE	
27	NOOR AMIATI	P	Front OFFICE	
28	IWAN SETIAWAN	L	STAF	
29	Muhammad yoga	L		
30	Noor Meliani	P		
31	Nadlatul humairah	P	Back office	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT



MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
 UNIT KERJA : Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 ATAS NAMA : Iwan Setiawan, Amd
 TAHUN : 2022

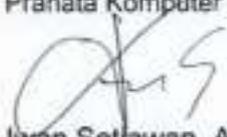
NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Melakukan Penggandaan data dan program (0,013/25Kb)	100 berkas	20	30	55	100
2	Membuat laporan operasi komputer (0,013/laporan)	100 Laporan	15	45	65	100
3	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	100 Dokumen	20	40	60	100
4	Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100 berkas	25	50	80	100
5	Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100 berkas	10	50	80	100
6	Perekaman data (0.013/25 KB)	100 berkas	10	50	70	100
7	Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	150	30	50	90	150

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan


Aryanadi, S. Sos

NIP. 19730108 199303 1 003

Rantau, Desember 2022
 Pranata Komputer


Iwan Setiawan, A.Md

NIP. 197601032010011012

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
UNIT KERJA : SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ATAS NAMA : Fathur Rahman Ruslie, Amd
TAHUN : 2022

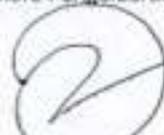
NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya kuitansi SPJ belanja kegiatan	400 kuitansi	138	357	638	999
2	Tersedianya SPP Ganti Uang	12 Dokumen	2	5	7	12
3	Tersedianya SPP LS (Langsung)	26 Dokumen	11	22	30	79
4	Tersedianya SPP Uang Persediaan	1 Dokumen	1	1	-	1
5	Tersedianya SPP Tambah Uang	2 Dokumen	-	2	3	7
6	Tersedianya SPP Ganti Uang Nihil	1 Dokumen	-	2	3	1
7	Tersedianya Tambah Uang Nihil	2 Dokumen	-	2	3	7
8	Terlaksananya input data SPJ ke SIMDA Keuangan	400 kuitansi	138	357	638	999
9	Terlaksananya Input Pemindah bukuan (PINBUK)	150 Laporan	50	150	228	-
10	Tersedianya laporan pertanggung jawaban bulanan	12 Laporan	3	6	9	12
11	Tersedianya laporan penutupan kas	12 Laporan	3	6	9	12
12	Tersedianya bahan pembuatan Laporan Keuangan	2 Laporan	1	2	2	2

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Syamsul Bakhril, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, Desember 2022
Bendahara Pengeluaran



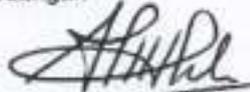
Fathur Rahman Ruslie, Amd
NIP. 198507072007011005

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT ORGANISASI : SEKERTARIAT
UNIT KERJA : SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ATAS NAMA : DINA JULIANI, SE
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KERJA	TARGET	REALISASI			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1	Tersedianya Data Laporan Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%	64%	86%	93%	100%
2	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang sesuai target dan tepat waktu	100%	33%	67%	100%	100%
3	Tertindakannya administrasi keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Kasubbag. Perencanaan dan
Keuangan



Syarif Bakri, SE
NIP. 197504222010011013

Rantau, Desember 2022
Penata Keuangan



Dina Juliani, SE
NIP. 199207162019032010



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.co.id
Rantau

Nomor : 570 / 01 /Sekrt-DPMPTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian
Triwulan IV T.A 2022

Rantau, 02 Januari 2023

Kepada Yth.
Seluruh ASN DPMPTSP
Kabupaten Tapin
Di-
Rantau

Sehubungan akan berakhirnya periode triwulan IV (Oktober s.d Desember) tahun anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh ASN DPMPTSP dalam rangka Rapat Monev Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Triwulan IV T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.30 wita s.d selesai
Tempat : Ruang DPMPTSP Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tapin

Ryza Rimbadi, SE

NIP. 19740315 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpnptsp.tapin@gmail.com web. www.bpnptsp.tapinkab.co.id

Pembahasan : NOTULEN MONEY DAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV

Hasil Rapat :

• **Sekretariat**

Target realisasi sekretariat terutama pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 17 laporan dari 17 laporan, sedangkan laporan sudah terealisasi diantaranya: IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan akhir tahun 2022 sebelum audited, Laporan Keuangan akhir tahun 2022 audited, Laporan Keuangan Semester 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Renja awal 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020, Monev triwulan I s.d IV.

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	
	K	K	K	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	100%	98%	98%	83,37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	83,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	91,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	60,65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	57,54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84%	84%	86,01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	94,92

• **Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :**

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV perizinan yang diterbitkan yaitu 1.788 Izin dengan target 600 Izin. Pada triwulan 4 dilaksanakan Sosialisasi PBG pada 12 kecamatan.

Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85 Poin	86,68 Poin	101,98	97,15
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan	600 Izin	1.788 Izin	298%	97,15

- **Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal :**

Pada triwulan III Kegiatan dibidang Bid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terutama untuk kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal telah dilaksanakan yaitu di Kota Semarang. Pameran investasi yang kedua tidak jadi dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau (Batam). Sedangkan untuk kegiatan FGD pembuatan peta potensi daerah telah dilaksanakan pada triwulan ke III. Potensi dan peluang investasi yang tersusun yaitu Padi, Jagung, Penggalian Pasir, Karet dan Penggalian Batu Gunung, Ikan Nila (Perikanan, Kain Sasirangan, Kelapa Sawit, Ikan Mas, Penyediaan Akomodasi.

Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara Caka khas Tapin dengan PT. Binnuang Mitra Bersama.

Rata-Rata Capaian Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100%	100%	100%	100%

- **Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :**

Triwulan I untuk kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal masih belum bisa dilaksanakan, karena anggaran kegiatan bersumber pada DAK dan baru selesai penginputan pada bulan Februari, sehingga kegiatan akan efektif terlaksana setelah anggaran pergeseran.

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan September sebanyak 25 Perusahaan. Dengan Pelaku Usaha yang di bina pada Kegiatan Bimtek terealisasi 43% dan Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM sebanyak 96% dari target 100%.

Nilai Investasi	525 Milyar	749,69 Milyar	142,80	50,95
Perusahaan Pemilik Izin yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100%	72%	71,67	33,93

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	65,28
Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100%	100%	100%	65,28

- **Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan :**

Kegiatan SKM akan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Penyusunan Perda. Penanaman Modal telah dalam bentuk rancangan. Sedangkan jumlah aduan pada triwulan IV tidak ada. Sehingga Jumlah aduan yang di terima hanya terdapat pada Triwulan I dengan 1 (satu) aduan masyarakat.

Rata-Rata Capaian Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%
Peluang Penanaman Modal yang Di Promosikan	100%	100%	100%	100%

PELAKSANA/ STAFF

Masing-masing staff/ pelaksana agar dapat melaporkan kinerjanya dalam bentuk Monev Indikator Kinerja Individu Triwulan IV dan dilaporkan kepada atasan langsung.

Notulis,
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan



Syamsul Bakhri, SE

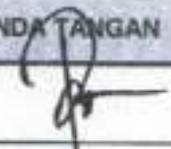
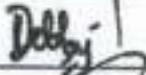
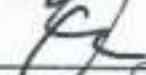
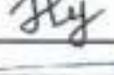
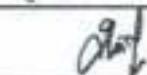
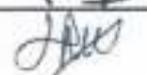
NIP. 19750422 201001 1 013

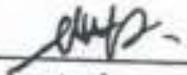
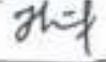
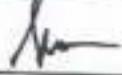
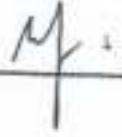
**DAFTAR HADIR RAPAT APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Hari / Tanggal : Rabu 4 Januari 2023

Jam / Pukul : 09.30 s.d Selesai

Pembahasan : Rapat Monitor Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Tr IV I.A 2022

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ryza Ramadie, SE	L	Kepala Dinas	
2	Debby Estimulia, SE	P	Sekretaris	
3	Dewi Eta Anyani, SM	P	Kabid Perencanaan, Pengembangan IKT dan Promosi	
4	Anggasa	L	Kepal	
5	Mairita Devi Eka Perti	P	PTT	
6	Hj. Helda Zuliana	P	Kabid PKPL	
7	Ismail Fahmi	L	Kabid. Perizinan dan NP	
8	Syamsul Bahri	L	Kasubbag Perencana & Keu	
9	NOOR AMIATI	P	BACK OFFICE	
10	Siti Hurul M.	P	PTT	
11	Dina Jaltani	P	staf	
12	DENNY RUSADI	L	PTT	
13	Arini Novia	P	PTT	
14	Mariyana	P	JT. Analis Kebijakan	
15	Kina Perwati	P	PTT	
16	Nadlatul humairah	P	PTT	
17	Neor Akhson Setiawan	PR	PTT	
18	M. RASID RIDHANI	L	PTT	
19	Fathur Rahman	L	Staf	
20	Noni Dita F.	P	PTT	
21	Widya Sulthana	P	PTT	

NO	NAMA	Jenis kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Rusna Mahrita	P	Analisis Kebijakan	
23	Ahmad Rizki	L	Tenaga Kontrak	
24	Eliza Delza V	P		
25	IWAN SETIAWAN	L	STAF	
26	Hamedia chintya putri	P	PTT	
27	Herti Muliana Lestari	P	PTT	
28	Suwarnama	L	Analisis Kebijakan	
29	HISFE SARI	P	PTT	
30	Jalus ariani wijaya	L	PTT	
31	M-yusuf	L	Fasubag. Umpag	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DOKUMENTASI FOTO RAPAT





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



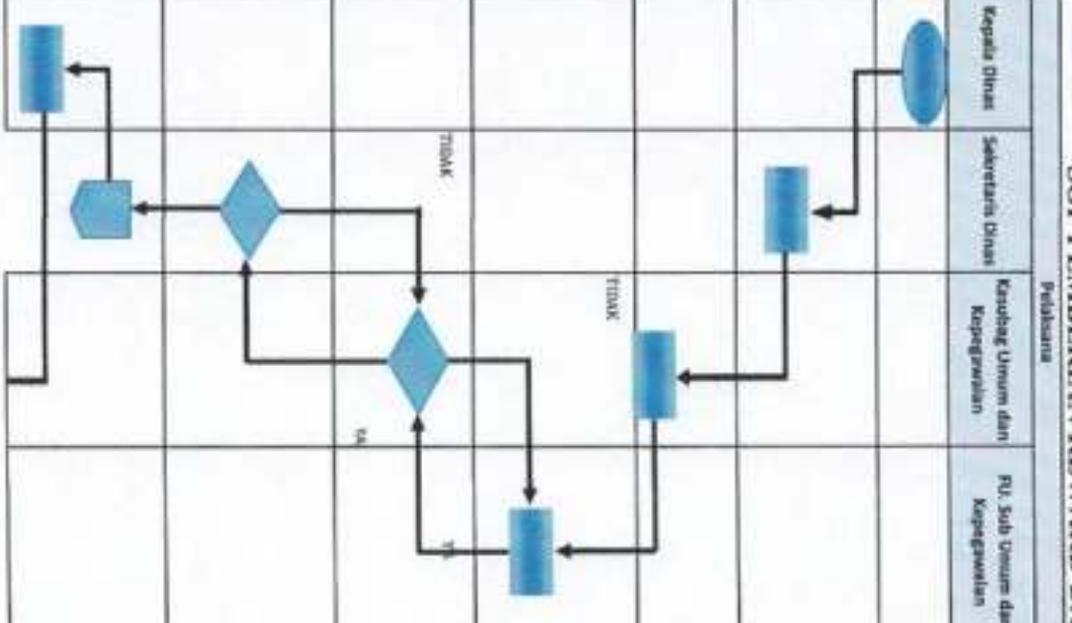
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

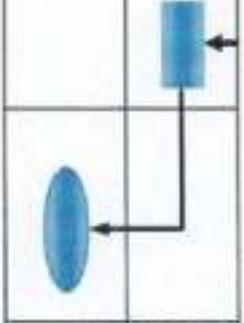
	<table border="1"> <tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr><td>Tanggal Revisi</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr><td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr><td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</td></tr> <tr><td>Nama SOP</td><td>:</td><td>Pemberian Reward dan Punishment</td></tr> </table>	Nomor SOP	:	:	Tanggal Pembuatan	:	:	Tanggal Revisi	:	:	Tanggal Pengesahan	:	:	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin	Nama SOP	:	Pemberian Reward dan Punishment
Nomor SOP	:	:																	
Tanggal Pembuatan	:	:																	
Tanggal Revisi	:	:																	
Tanggal Pengesahan	:	:																	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin																	
Nama SOP	:	Pemberian Reward dan Punishment																	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat; 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 9. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urutan Tugas Organisasi DPMPTSP Kabupaten Tapin 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis DPMPTSP : S1 Ekonomi, 2. Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : S1 Ekonomi, 4. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian Keuangan : S2/S1/ SMA / SMK/ SMEA 																		
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra OPD 2. Rencana Kerja OPD 3. Dokumen DPA 																		

	<ol style="list-style-type: none">4. Dokumen Perjanjian Kinerja5. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD6. Rekap Kehadiran Pegawai7. Perangkat Komputer
Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mekanisme Reward dan Punishment ini tidak berjalan lancar.	Pencatatan dan Pendataan 1. Rekap Kehadiran Pegawai

SOP PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	RU, Sub Umum dan Kepegawaian				
1	Mengajukan Seadis untuk melaksanakan penilaian unsur-unsur untuk pemberian Reward dan Punishment	●				Disposisi perintah Kasdis	10 Menit	Disposisi perintah Kasdis	
2	Mengajukan dan memberikan arahan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk menyiapkan penilaian untuk pemberian Reward dan Punishment	▭				Disposisi perintah Kasdis	10 Menit	Disposisi perintah Kasdis dan arahan Seadis	
3	Melakukan pendataan dan membuat rekapitulasi unsur-unsur penilaian reward dan punishment			▭		Mengumpulkan bahan penilaian unsur-unsur reward dan punishment	1 Hari	Bahan Penilaian Reward dan Punishment	
4	Melaksanakan pengertikan data dan menyerahkan hasilnya kepada Sekretaris			▭		Bahan penilaian Reward dan Punishment	2 jam	Draf dokumen Reward dan Punishment	
5	Memeriksa, meneliti dan memperbaiki dokumen hasil rekap unsur-unsur Reward dan Punishment, jika YA diparaf dan diserahkan kepada Diras, jika TIDAK dibatalkan kepada RU, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dipertali			◇		Draf dokumen Reward dan Punishment	1 jam	Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment setelah diparaf	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan masukan terhadap dokumen hasil rekap unsur-unsur Reward dan Punishment, jika YA di paraf dan diajukan ke Kasdis, jika TIDAK dibatalkan lagi kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dipertali dan diumpurnakan		◇			Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment telah diparaf	1 jam	Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment telah diparaf Sekretaris	
7	Menandatangani dokumen penilaian Reward dan Punish dan menyerahkan kembali kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk didistribusikan	▭				Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment telah diparaf Sekretaris	15 menit	Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment ditandatangani Kepala Dinas	



9	Meneriksa dan menugaskan TU Sub Bagian Umum dan kepegawaian untuk menggendakan, mendistribusikan dan mempersiapkan			Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment diantarangkan Kepala Dinas	1 Jam	Dokument Hasil Penilaian Reward dan Punishment
10	Menggendakan, mendistribusikan dan mempersiapkan			Dokumen Hasil Penilaian Reward dan Punishment	1 Hari	Buat pendistribusian / pengiriman dokumen

KETUA BAKAS PENANAMAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

	Nomor SOP	::	
	Tanggal Pembuatan	::	
	Tanggal Revisi	::	
	Tanggal Pengesahan	::	
	Disahkan Oleh	::	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin
	Nama SOP		Pengukuran Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Kadis DPMPTSP : S1 Ekonomi,		
2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	2. Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi		
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan : S1 Ekonomi,		
4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	4. Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan : S2/S1/ SMA / SMK/ SMEA		
5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin			
6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu			
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;			
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi DPMPTSP Kabupaten Tapin			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	1. Renstra OPD		
	2. Rencana Kerja OPD		
	3. Dokumen DPA		
	4. Dokumen Perjanjian Kinerja		
	5. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD		
	6. Perangkat Komputer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mekanisme Pengukuran Kinerja ini tidak berjalan lancar.	1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja		

SOP PENGUKURAN KINERJA

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sejabatans Dinas	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Bidang-Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja DP/ADTSP					Lembar disposisi	15 Menit	disposisi Pengiran	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran Kinerja	60 Menit	Draf Pengukuran Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran kinerja	25 Menit	Draf masukan dan arahan	
4	Mengundang kepala DP/ADTSP dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja					Undangan Rapat	30 Menit	Undangan Rapat	
5	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja					Draf Pengukuran Kinerja	120 Menit	Draf Pengukuran Kinerja	
6	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat					Draf Pengukuran Kinerja	1 Hari	Draf Pengukuran Kinerja	
7	Kabid Menghimpun dan memvalidasi data kinerja					Draf Pengukuran Kinerja	1 Hari	Draf Pengukuran Kinerja	

8	Menyampaikan data kinerja kepada Kasabid Data				Draf Pengukuran Kinerja	30 Menit	Draf Pengukuran Kinerja
9	Kepala Badan mengoreksi Dokumen Pengukuran Kinerja DPMPTSP				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja
10	Sekretaris menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja kepada Kepala Badan untuk menelaah persetujuannya.				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja
11	Penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh DPMPTSP				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja
12	Pembuatan surat pengantar pengiripan dan penomoran surat				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja
13	Penggunaan Dokumen Pengukuran Kinerja				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja
14	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja				Dokumen Pengukuran Kinerja	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI RENJA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

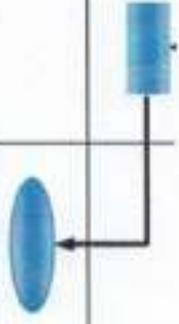


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> <p align="center">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</p>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:		Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:		Disahkan Oleh	:	
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:															
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:															
Disahkan Oleh	:															
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi DPMPTSP Kabupaten Tapin 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis DPMPTSP : S1 Ekonomi, 2. Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : S1 Ekonomi, 4. Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan : S2/S1/ SMA / SMK/ SMEA 															
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra OPD 2. Rencana Kerja OPD 3. Dokumen DPA 4. Dokumen Perjanjian Kinerja 5. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 6. Perangkat Komputer 															
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mekanisme Evaluasi Renja ini tidak berjalan lancar. 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja 															

SOP EVALUASI RENJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Keuangan				
1	Memngatkan Sekdis untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Renja Dinas				Disposisi perintah Kadis	10 Menit	Disposisi perintah kadis	
2	Memngatkan dan memberikan arahan kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk berkoordinasi dengan bidang bidang pengelola program dan kegiatan untuk mendapatkan data progres kegiatan				Disposisi perintah Kadis	10 Menit	Disposisi perintah kadis dan arahan Sekdis	
3	Berkoordinasi dengan bidang-bidang untuk mengumpulkan, mempelajari, menghimpun data dan menyusun konsep dokumen Monrev serta menyerahkan kepada FU, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi				Disposisi perintah Kadis dan arahan Sekdis	2 Hari	Mengumpulkan bahan penyusunan Monrev Renja dari bidang-bidang	
4	Melaksanakan pengelitan data dan menyerahkan hasilnya kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi				Mengumpulkan bahan penyusunan Monrev Renja dari bidane-bidane	1 Hari	Draf dokumen Monrev Renja	
5	Memeriksa, meneliti dan mempelajari draf dokumen Monrev Renja, jika YA diparaf dan diserahkan kepada Sekdis, jika TIDAK dikembalikan kepada FU, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki				Draf dokumen Monrev Renja	1 Jam	Dokumen Monrev Renja di paraf Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan masukan terhadap draf dokumen Monrev Renja, jika YA di paraf dan diajukan ke Kadis, jika TIDAK dikembalikan lagi kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki dan disempurnakan				Dokumen Monrev di paraf Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1 Jam	Dokumen Monrev Renja di paraf Sekdis	
7	Memandatangani dokumen Monrev Renja dan menyerahkan kembali kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk digandakan dan didistribusikan				Dokumen Monrev di paraf Sekdis	15 menit	Dokumen Monrev Renja ditandatangani Kadis	
	Menerima dan mengajukan FU, Sub Bagian Perencanaan				Dokumen Monrev	10 Menit	Dokumen Monrev Renja	

8	dan Evaluasi untuk mengadakan, mendistribusikan dan menyerahkan				diantarlangsang Kodis
9	Mengadakan, mendistribusikan dan menyerahkan				Dokumen Moner 1 Hari Bukti pendistribusian / pengittaman dokumen

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

Nomor SOP	:	:
Tanggal Pembuatan	:	:
Tanggal Revisi	:	:
Tanggal Pengesahan	:	:
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin
6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu. Tim Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.

Keterkaitan

1. SOP Perjanjian Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra OPD
2. Format penyusunan LAKIP
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD
5. Laporan Realisasi Keuangan
6. Perangkat Komputer

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU		Output	Keterangan		
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Staff/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Memertibahkan penyusunan LAKIP		MULAI					Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan Informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan LAKIP	3 Hari	Format penyusunan LAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan Informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan LAKIP	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan Informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan LAKIP	2 Hari	Format penyusunan LAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan Informasi kinerja yang telah terkumpul							Format penyusunan LAKIP	4 Hari	Draft LAKIP	SOP perjanjian kinerja
6.	Membuat Dokumen LAKIP							Draft LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP perjanjian kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP							Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan							Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubag Program					Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP	
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	1 Jam	Surat pengantar	-	
11.	Mengantar surat, mengandatangani dan mempersiapkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala SKPD	Sekretaris SKPD	Kepala Bidang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
1	Memerintahkan Sekretaris SKPD untuk melakukan rapat dan mengkoordinir Kepala Bidang untuk menyusun draft RKA					Bahan rapat mengenai penyusunan RKA	5 Menit	Nota dras	
2	Melakukan rapat dan memerintahkan Kepala Bidang untuk menyusun draft RKA					Bahan rapat	2 Jam	Notulen rapat	
3	Menyusun draft RKA per Sub Kegiatan dan diserahkan kepada Kepala SKPD					Draft RKA Sub Kegiatan/Bidang dan SSH	5 Hari	Draft RKA Subkegiatan/Bidang	
4	Mengoreksi draft RKA, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki dan jika setuju diparat dan diserahkan kepada Kepala SKPD					Draft RKA Sub kegiatan/bidang	1 Hari	Draft RKA SKPD	
5	Memerintahkan RKA melakukan Input ke SIPD untuk dan menyerahkan hard copy dan Soft Copy RKA kepada Bagian Anggaran BPKAD					RKA SKPD	4 Hari	RKA SKPD	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pembayaran SPJ Belanja

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td> <td>:</td> <td>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>:</td> <td>Pembayaran SPJ Belanja</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:		Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:		Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin	Nama SOP	:	Pembayaran SPJ Belanja
Nomor SOP	:																		
Tanggal Pembuatan	:																		
Tanggal Revisi	:																		
Tanggal Pengesahan	:																		
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin																	
Nama SOP	:	Pembayaran SPJ Belanja																	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis DPMP/PTSP : S1 Ekonomi. 2. Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : S1 Ekonomi. 4. Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan : S2/S1 																		
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra OPD 2. Standar Satuan Harga (SSH) 3. Perangkat Komputer 																		
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pembayaran SPJ tidak berjalan lancar. 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIMDA 																		

SOP Pembayaran SPJ Belanja

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Kepala SKPD	PPTK	PPK	Bidang: Sub. Bagian	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat SPJ belanja, kemudian menyerahkan berkas SPJ ke verifikasi						Berikan penyusunan SPJ	1 Hari	Berkas SPJ	
2	Melakukan verifikasi berkas SPJ belanja, jika tidak lengkap berkas dikembalikan, jika lengkap berkas diparaf dan diserahkan ke PPTK						Berkas SPJ	1 Jam	Berkas SPJ	
3	PPTK menandatangani berkas SPJ			ya			Berkas SPJ	1 Jam	Berkas SPJ	
4	Kepala SKPD menandatangani berkas SPJ, kemudian diserahkan ke bendahara			tidak			Berkas SPJ	1 Jam	Berkas SPJ	
5	Menerima berkas SPJ untuk dilakukan pembayaran						Berkas SPJ	3 Jam	Berkas SPJ	

KEPALA DINAS PENANGKALAN MOBAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

Dasar Hukum 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	Nomor SOP	:	:
	Tanggal Pembuatan	:	:
	Tanggal Revisi	:	:
	Tanggal Pengesahan	:	:
	Disahkan Oleh	:	:
Nama SOP	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)		
Kualifikasi Pelaksana 1.Kadis DPM/PTSP : S1 Ekonomi. 2.Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi 3.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : S1 Ekonomi. 4.Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan : S2/S1			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Lembaran Kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK,		
Peringatan 1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan Monev Renstra belum dapat dilakukan	Pencatatan dan Pendataan 1. Dokumen Monev Renstra		

SOP : Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Renstra

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelempakan	Waktu	Output
		Kepala Dinas	Subertaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Staff/Pelaksana			
1	Mengajukan Sisdan untuk melaksanakan moner moner DIPA/RTRGP					15	Ment	Disposisi perintah Kadis
2	Mengajukan dan membina arahan kepada Kasubdag Perencanaan dan Pelaporan untuk berkoordinasi dengan bidang bidang program program/bidang untuk mendapatkan data program					15	Ment	Disposisi perintah Kadis dan Arahan Sisdan
3	Berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka menyusun moner					3	Hari Kerja	Mengumpulkan bahan penyusunan Moner Renstra dari Bidang
4	Melaksanakan pengisian data dan menyerahkan hasilnya kepada kasubdag perencanaan dan pelaporan					1	Hari Kerja	Draf dokumen Moner Renstra
5	Meninjau dan memperbaiki draft moner renstra jika ya, diperat dan diserahkan kepada Kasubdag jika tidak, maka dirubuhkan kepada ahlini untuk diperbaiki.					1	Jam Kerja	Dokumen Moner diparaf kasubdag Perencanaan dan Pelaporan
6	Meninjau dan memperbaiki draft moner renstra jika ya, diperat dan diserahkan kepada Kasubdag jika tidak, maka dirubuhkan kepada Kasubdag untuk diperbaiki.					2	Jam Kerja	Dokumen Moner diparaf Kasubdag Perencanaan dan Pelaporan
7	Meninjau dan memperbaiki draft moner renstra memadangkan moner renstra. Kemudian menyerahkan kembali kepada Kasubdag Perencanaan dan Pelaporan untuk diparaf dan didistribusikan					15	Ment	Dokumen Moner diparaf Sisdan
8	Meninjau dan mengonfirmasi pelaksanaan untuk mengklarifikasi dan mendistribusikan laporan moner					15	Ment	Dokumen Moner Renstra didistribusikan oleh Kadis
9	Mengendalikan dan mendistribusikan serta mempersiapkan untuk pembuatan lampiran					1	Hari Kerja	Draf pengendalian, pendistribusian dokumen

KEPALA DINAS PENANJANG MIBUKU JOJO PALAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

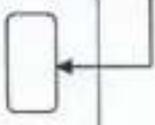


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN TAPIN**

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi DPMPTSP Kabupaten Tapin 	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Dikahkan Oleh</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> </table> <p align="center">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</p>	Nomor SOP	:	:	Tanggal Pembuatan	:	:	Tanggal Revisi	:	:	Tanggal Pengesahan	:	:	Dikahkan Oleh	:	:
Nomor SOP	:	:														
Tanggal Pembuatan	:	:														
Tanggal Revisi	:	:														
Tanggal Pengesahan	:	:														
Dikahkan Oleh	:	:														
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.Tim Pelayanan Perizinan Terpadu 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi DPMPTSP Kabupaten Tapin 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis DPMPTSP : S1 Ekonomi. 2. Sekretaris : S2 Ekonomi, S1 Ekonomi 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : S1 Ekonomi. 4. Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan : S2/S1/ SMA / SMK/ SMEA 															
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perjanjian Kinerja 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra OPD 2. Rencana Kerja OPD 3. Dokumen DPA 4. Dokumen Perjanjian Kinerja 5. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 6. Perangkat Komputer 															
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mekanisme pengumpulan data Kinerja ini tidak berjalan lancar. 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja 															

SOP : MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Staff	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Kabid	Kasat				
1	Membuat draft format data kinerja						• Daftar pertanyaan	2 hari	• Draft format data kinerja	
2	Mengkoreksi format data kinerja bila benar di digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						• Draft format data kinerja	20 menit	• Format data kinerja	
3	Mengandatangani dan menyerahkan ke Kabid						• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
4	Memeriksa dan mengisi data kinerja							3 hari	• Format data kinerja sudah diisi	
5	Memeriksa dan verifikasi data kinerja dari bidang						• Format data kinerja yang sudah tensi	1 hari	• Data kinerja yang sudah terverifikasi	
6	Mengentry dan menyerahkan data kinerja pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan						• Data kinerja yang sudah terverifikasi	2 hari	• Print out data kinerja	
7	Validasi dan paraf data kinerja						• Print out data kinerja	10 menit	• Print out data kinerja yang sudah di paraf	

8	Paraf data kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf
9	Menandatangani data kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah ditandatangani

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU



RYZA RAMADIE, SE

NIP. 19740315 200003 1 004